



## Rapat Koordinasi Perencanaan Tingkat Provinsi

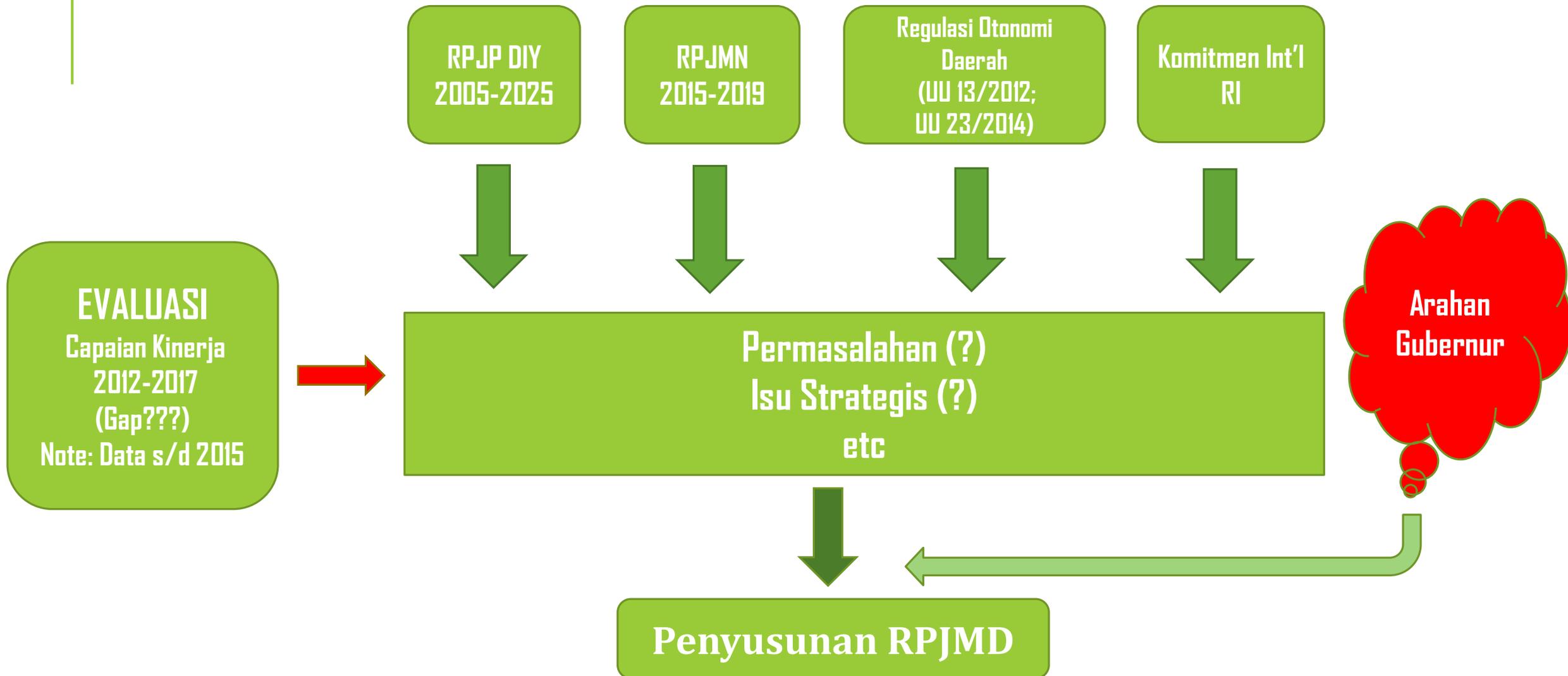
***“Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran  
Dalam Upaya Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN”***

8 Desember 2016

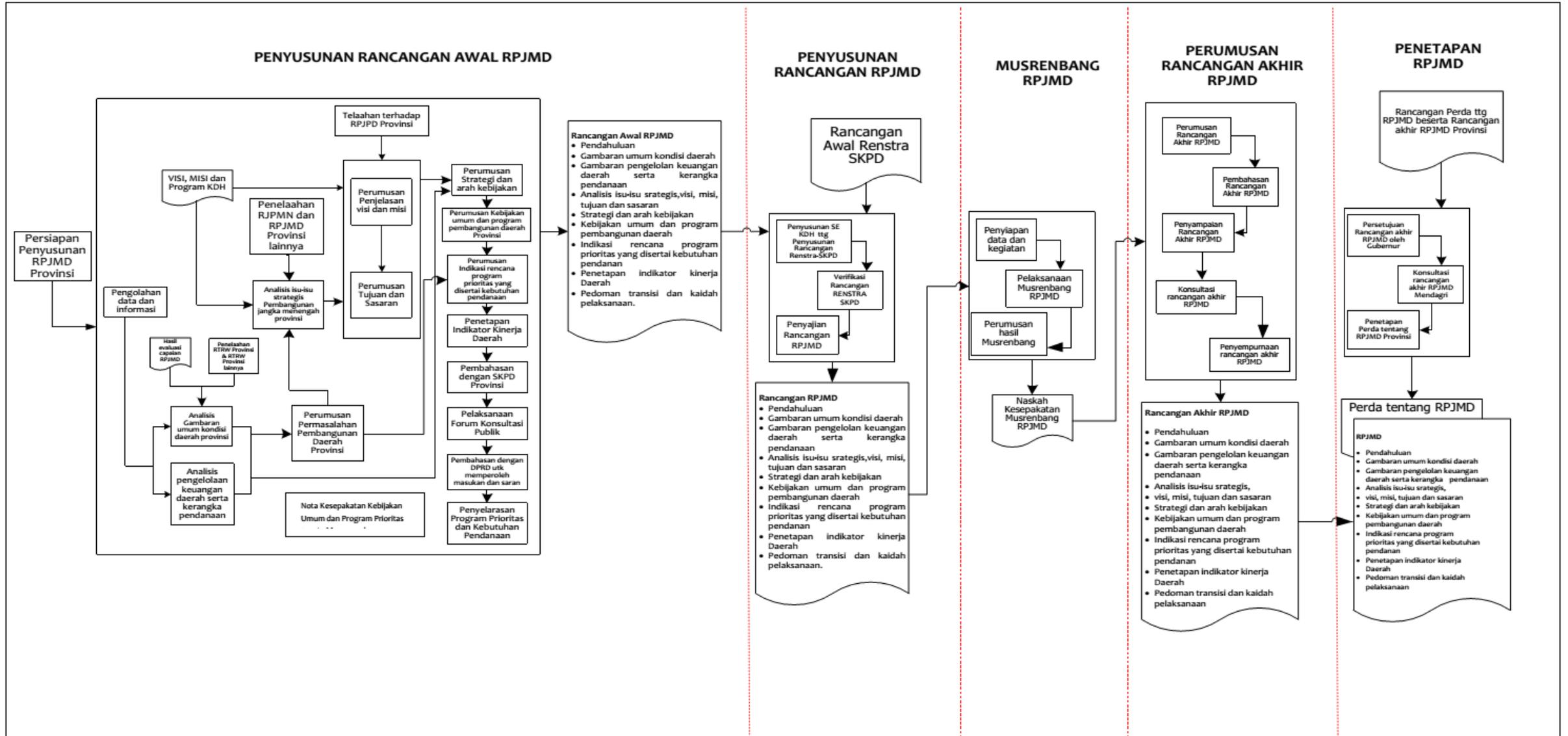
# Background Study RPJMD DIY

A.Mardiansyah

# KERANGKA PIKIR *BACKGROUND STUDY* RPJMD



# TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD





RPJPD 2005-2025	Lima Tahun Tahap I					Lima Tahun Tahap II					Lima Tahun Tahap III					Lima Tahun Tahap IV					2025
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
RPJMD 2009-2013					2009	2010	2011	2012	2013												
RPJMD 2012-2017								2013	2014	2015	2016	2017									
RPJMD 2017-2022													2018	2019	2020	2021	2022				





**DIY 2025**



**pusat pendidikan,  
pusat budaya,  
dan  
daerah tujuan wisata  
terkemuka di Asia**

# PILAR UTAMA, PROGRAM STRATEGI DAN KEGIATAN UNGGULAN



- Pelestarian
- Pengembangan

Pemahaman yang benar meneladani budaya sebagai tata nilai, simbo-simbol dan produk dari perikehidupan masyarakat DIY

---



Sumber Daya Manusia yang berkarakter

SDM DIY yang mempunyai daya saing di dunia international

---



Berbasis Wilayah

Tumbuhnya perekonomian DIY yang inklusif berbasis tourism [*visit Jogja years*] dalam situasi ekonomi global dunia

---

# Capaian Kinerja

# IKU RPJMD

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
1	<b>Sasaran : Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.</b>							
	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	%	n/a	n/a	67,28	68,58	70,00	Sesudah Perubahan
	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	%	30	40	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan

## Capaian:

No	Indikator	Capaian 2014	Target	2015 Realisasi	% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
1.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.	65,73%	67,28	69,04	102,62	70%	98,63

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
2	<b>Sasaran : Melek huruf masyarakat meningkat</b>							
	Angka Melek huruf	%	n/a	n/a	93,85	94,65	95,00	Sesudah Perubahan
	Angka Melek huruf	%	91,99	92,60	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan

## Capaian:

Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Melek Huruf	Persen	93,68	93,85	94,44	100,63	95	99,41

### Angka Melek Huruf (AMH) DIY dan Nasional menurut Kelompok Umur 2011-2015 (Persen)

Usia	Cakupan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
15+	DIY	91,04	92,00	92,82	94,44	94,50
	Nasional	92,44	92,97	93,92	95,12	95,22
15-44	DIY	99,37	99,66	99,80	99,91	99,81
	Nasional	97,69	97,97	98,39	98,76	98,90
45+	DIY	78,94	80,83	82,47	86,29	87,20
	Nasional	81,85	82,83	84,85	87,75	88,11

Sumber: BPS DIY, 2016.

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
3	<b>Sasaran : Aksesibilitas pendidikan meningkat</b>							
	Rata-rata lama sekolah.	Tahun	9,60	10,00	10,80	11,60	12,00	Tetap

## Capaian:

Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,72	10,8	8,84*	-	12	-

\* Pengukuran data BPS menggunakan metodologi yang berbeda

Sumber: BPS DIY, 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-Rata Lama Sekolah DIY	8,51	8,53	8,63	8,72	8,84
Rata-Rata Lama Sekolah Nasional	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73

Sumber: Statistik BPS DIY, 2015.

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
4	<b>Sasaran : Daya Saing Pendidikan meningkat</b>							
	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	%	-	5,00	10,00	20,00	40,00	Tetap

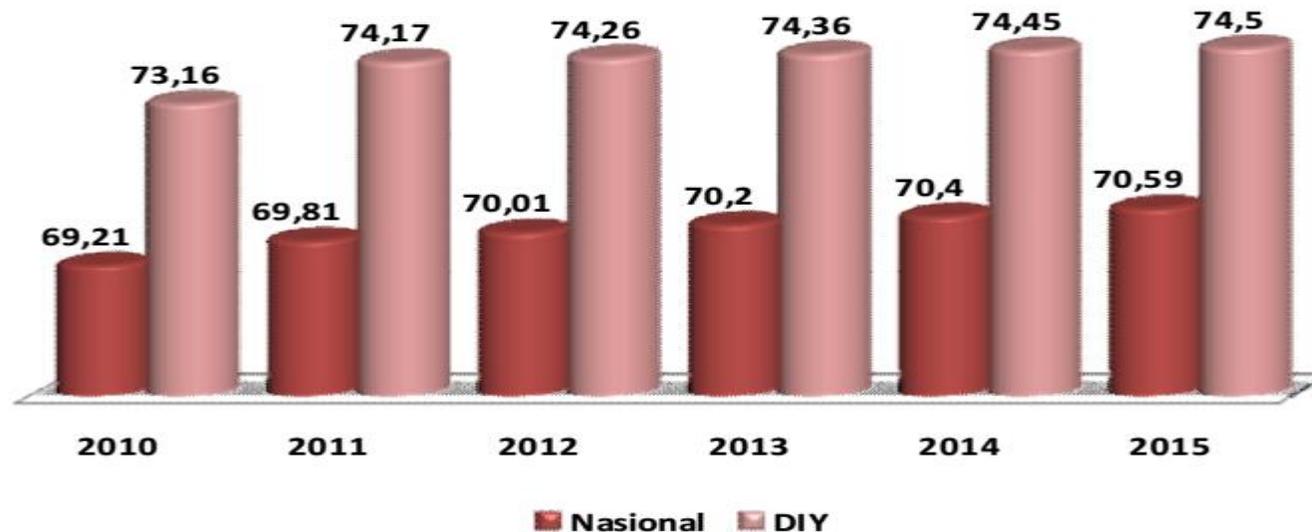
## Capaian:

Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015		Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi %		
Satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Persen	5	10	15,77	40	39,43

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
5	<b>Sasaran : Harapan hidup masyarakat meningkat</b>							
	Angka Harapan Hidup.	Tahun	n/a	n/a	73,81	73,96	74,18	Sesudah Perubahan
	Angka Harapan Hidup.	Tahun	73,37	73,67	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan

## Capaian:

Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,74	73,81	74,5	100,93	74,18	100,43

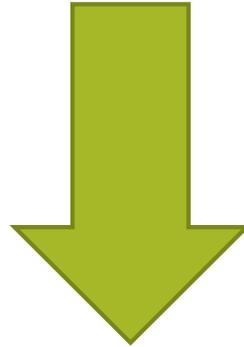


No	Indikator	Capaian 2014	Target	2015		Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
				Realisasi	% Realisasi		
6.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta).	7,10	7,8	22,68*	-	8,5	-
7.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	0,4479	0,4465	0,4480	99,67	0,4445	99,21
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	0,435	0,2898	0,43	51,62	0,2878	50,59
9.	Jumlah wisatawan nusantara.	3.091.967	3.581.860	3.813.720	106,47	4.561.646	83,60
10.	Jumlah wisatawan mancanegara.	254.213	261.053	308.485	118,17	272.162	113,35
11.	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1,58	2,3	1,85	80,43	2,6	71,15
12.	Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	1,95	2,35	2,07	88,09	2,69	76,95

No	Indikator	Capaian 2014	2015		% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi			
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	A	2	2	100,00	A	100
14.	Opini pemeriksaan BPK (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)	WTP	1	1	100,00	WTP	100
15.	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat.	37,82	38,57	39,05	101,24	42,57%	91,73
16.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	6,29	9,43	9,17	97,24	15,72%	58,33
17.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.	64,21	64,25	64,36	100,17	64,75%	99,39

# Evaluasi

Capaian Kinerja SKPD ???  
(Pengampu urusan pemerintahan)



IKU SKPD dalam  
RPJMD  
(*Sesuai  
Cascading*)

Acuan???

IKU SKPD dalam  
RENSTRA SKPD

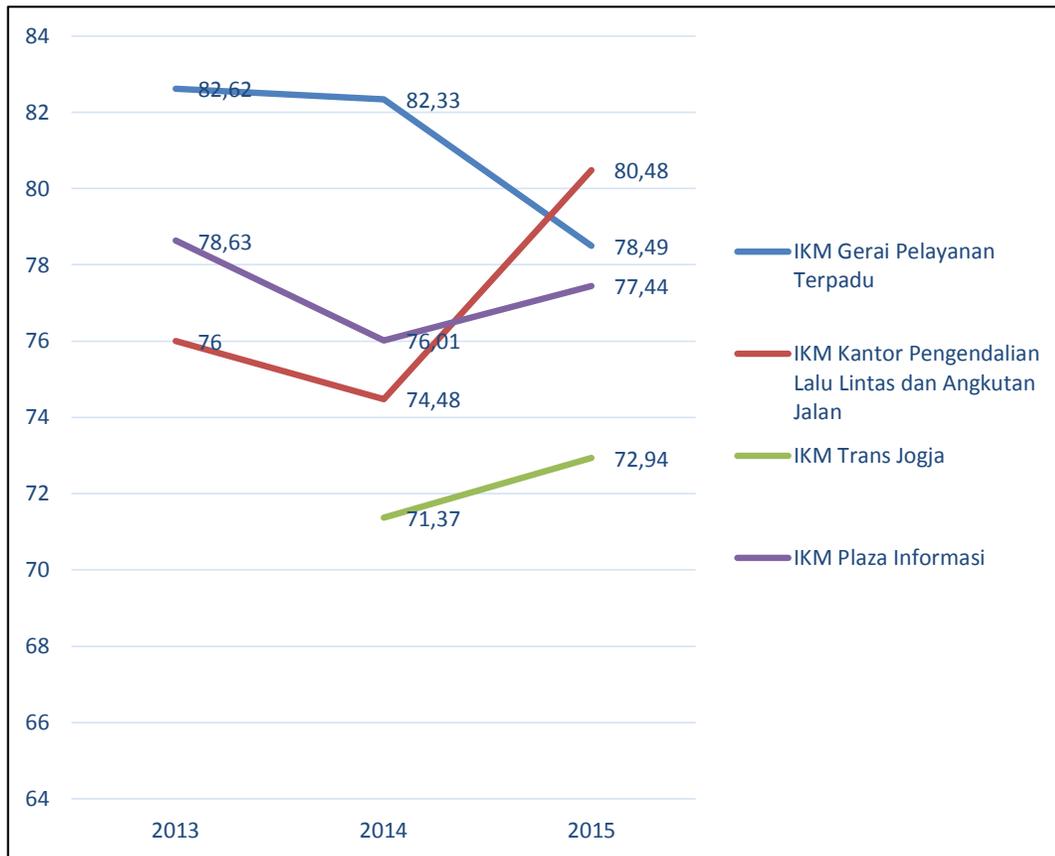
Acuan???

# Bidang Pemerintahan

## (Sri Purnaningsih)

# KINERJA PELAYANAN PUBLIK DIY

## IKM OPD PELAYANAN



Sumber : Bappeda DIY, 2016

## PELAYANAN PUBLIK : penataan sistem transportasi & akses masyarakat

Tahun	Rerata <i>load factor</i> angkutan perkotaan (%)
2010	28.00
2011	31.14
2012	32.57
2013	34.49
2014	37.82
2015	39,05

- *Load faktor* utk angk perkotaan reguler cenderung meningkat pada 2015, dan melebihi target (101,24%). Hal itu menunjukkan : masy DIY cenderung menggunakan angkutan umum perkotaan yang nyaman & dpt diandalkan, sehingga Trans Jogja diharapkan mampu berperan menggantikan angkutan umum perkotaan reguler

Sumber : Bappeda DIY, 2016

# KINERJA PELAYANAN PUBLIK DIY

## Jumlah Kasus Terkait Pelayanan Publik di LO DIY Tahun 2015

Bidang	Jumlah	Persentase	Penyelenggara
KEUANGAN (SWASTA)	45	17.93%	Swasta
KETENAGAKERJAAN (SWASTA)	40	15.94%	Swasta
PROPERTI-PERHOTELAN (SWASTA)	18	7.17%	Swasta
BISNIS & PERDAGANGAN (SWASTA)	14	5.58%	Swasta
TEKNOLOGI & KOMUNIKASI (SWASTA)	10	3.98%	Swasta
PENDIDIKAN (PEMERINTAH)	33	13.15%	Pemerintah
PERTANAHAN (PEMERINTAH)	27	10.76%	Pemerintah
KESEHATAN (PEMERINTAH)	16	6.37%	Pemerintah
BANTUAN SOSIAL (PEMERINTAH)	13	5.18%	Pemerintah
PERIZINAN(PEMERINTAH)	10	3.98%	Pemerintah
PENEGAKAN KEBIJAKAN (PEMERINTAH)	10	3.98%	Pemerintah
KEPENDUDUKAN	8	3.19%	
TRANSPORTASI	5	1.19%	
PERTAMBANGAN	1	0.40%	
PARIWISATA	1	0.40%	
	251	100%	

Sumber : Lembaga Ombudsman, 2016

# Permasalahan Pembangunan Sektor Politik

Permasalahan	Isu Strategis
Munculnya potensi konflik antara penduduk asli dengan pendatang, antar sesama penduduk asli, antara pendatang dengan pendatang	Penyelenggaraan urusan publik yang belum mengoptimalkan potensi berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintah serta penguatan jejaring dan kemitraan dengan aktor non pemerintah dalam penuntasan masalah publik
Adanya berbagai regulasi yang berbeda baik dari pemerintah DIY dan kabupaten/kota menimbulkan konflik antara pengusaha dengan masyarakat contohnya pemberian ijin pendirian minimarket waralaba di dekat pasar tradisional (sleman) dan pendirian bandara di kulon progo	Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam menunjang pelayanan publik belum optimal
Munculnya potensi konflik antara pengusaha hotel dengan masyarakat sekitar karena pertumbuhan hotel yang masif terjadi konflik terkait pemanfaatan air tanah, pengelolaan limbah, sanitasi dan parkir	Penguatan kelembagaan dan kapasitas aparat dalam konteks good governance belum optimal
Masih rendahnya penyelesaian konflik pertanahan (15% tahun 2014)	Adanya potensi konflik karena heterogenitas masyarakat
Masih rendahnya jumlah kecamatan di DIY yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu (baru 10 dari 78 kecamatan)	
<b>Pembersihan data kependudukan ganda dan pemutakhiran data base kependudukan</b>	

# Permasalahan Pembangunan Sektor Administrasi Publik dan Keuangan

---

Permasalahan	Isu Strategis
Keterbatasan kualitas pelayanan publik	Rendahnya kualitas pelayanan publik
Pertumbuhan realisasi pendapatan BUMD belum merata (16,60% tahun 2012-2014)	Upaya penggalan PAD terutama BUMD dan retribusi belum optimal

# Permasalahan Pembangunan Sektor Aparatur

---

Permasalahan	Isu Strategis
<p>Belum terintegrasinya budaya satriya ke dalam tindakan dan perilaku pegawai. (budaya satriya: selaras, akal budi luhur, teladan-keteladanan, rela melayani, inovatif, yakin dan percaya diri dan ahli-profesional)</p>	<p>Manajemen Sumber Daya Manusia Belum Optimal</p>
<p>Keterbatasan SDM (64% pegawai diatas 45 tahun dan 46% pegawai berusia 18-45 tahun)</p>	

# Permasalahan Pembangunan Sektor Hukum

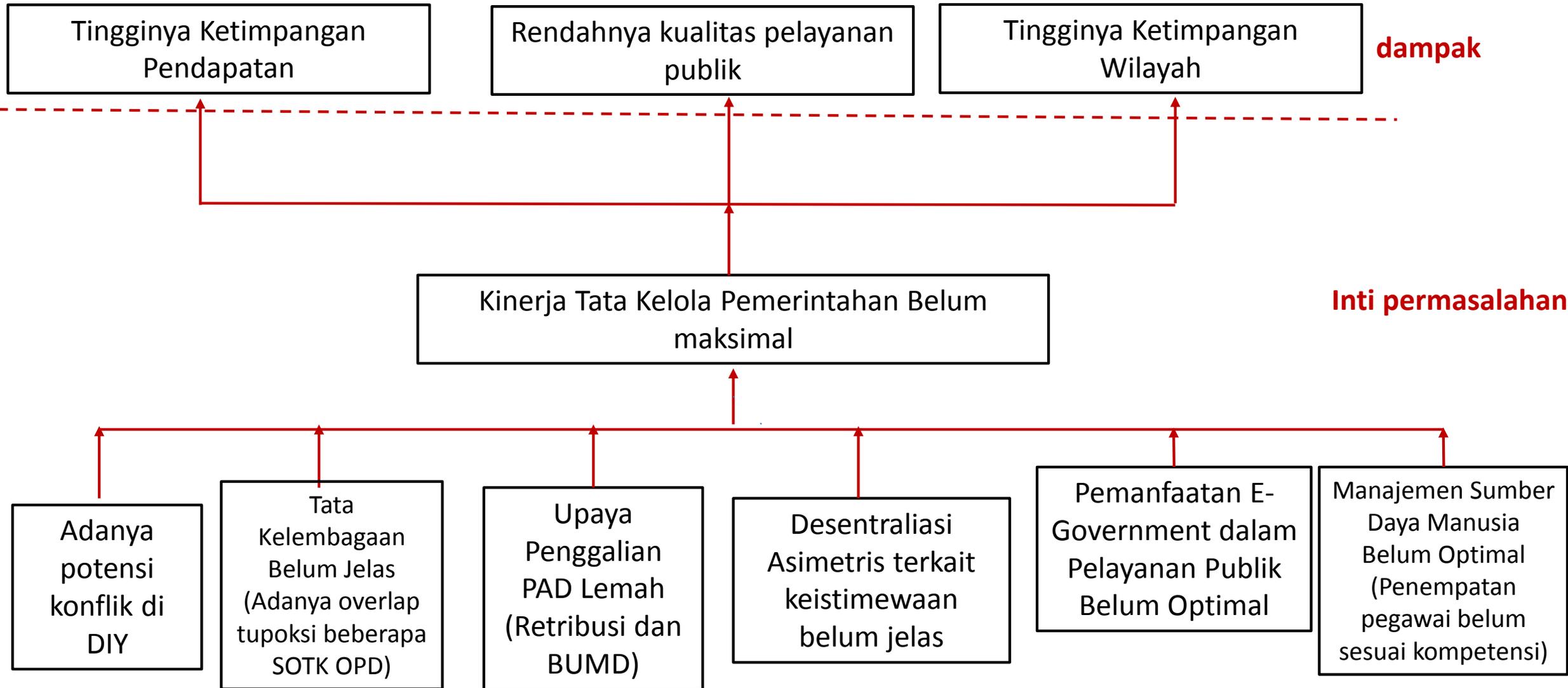
Permasalahan	Isu Strategis
Hasil rekomendasi LOD DIY belum sepenuhnya dilaksanakan oleh aparaturn pemerintah	Lemahnya kapasitas kelembagaan LOD DIY sebagai fungsi pengawasan
Belum meratanya informasi hukum bagi semua masyarakat	Aksesibilitas informasi hukum bagi semua masyarakat
Produk hukum belum responsif terhadap perubahan	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan kasus hukum
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum	Pemberantasan korupsi

# Permasalahan Pembangunan Sektor Pelayanan Publik

---

Permasalahan	Isu Strategis
Belum Optimalnya pelayanan transportasi	Masih rendahnya kualitas pelayanan internal dan eksternal
Belum optimalnya infrastuktur pendukung pelayanan bandar udara bertaraf internasional	
Belum optimalnya pelayanan unggulan digital government services	
Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi	

# Analisis Permasalahan



---

## Desentralisasi Asimetris Terkait Keistimewaan Belum Jelas

- Masih ada 3 Perdais yang belum ditetapkan yaitu urusan kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.
- Ketiga urusan tersebut merupakan urusan yang paling krusial dalam keistimewaan, namun sampai sekarang belum jelas desentralisasi asimetrisnya.
- Hal ini mengakibatkan tata kelembagaan dan pembagian kewenangan dalam ranah implementatif menjadi tidak jelas bentuknya.
- Akibat lebih lanjut dana keistimewaan menjadi tidak fokus dan belum dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah DIY

---

## **Pemanfaatan E-Government dalam layanan publik belum optimal**

- Digital Government Service (DGS) di DIY baru dikembangkan pada 12 bidang unggulan strategis, sehingga belum semua unggulan strategis menggunakan sistem ini
- Masih minimnya infrastruktur dan sumber daya di bidang layanan teknologi informasi.
- Pelaksanaan e-government DIY mayoritas masih dalam ranah pelayanan internal, ranah pelayanan publik baru pada perijinan dan perpustakaan
- Sistem DGS belum terintegrasi dengan kabupaten dan kota
- Masih rendahnya jumlah kecamatan di DIY yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu (baru 10 dari 78 kecamatan)

# Isu Strategis

---

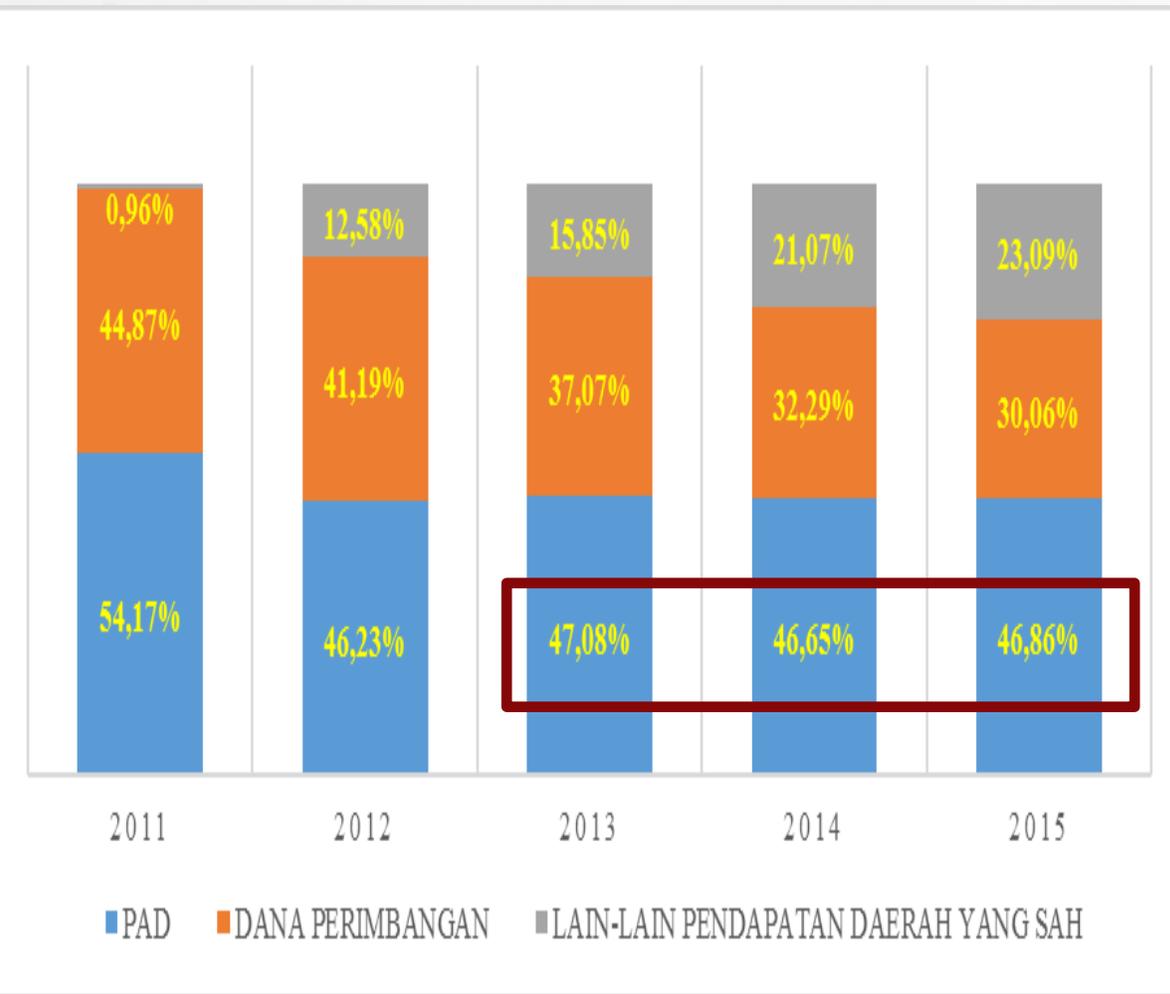
- Adanya potensi konflik di masyarakat
- Pemanfaatan E-government dalam layanan publik belum optimal
- Tata Kelembagaan Belum Jelas (Adanya overlap tupoksi pada beberapa SOTK OPD)
- Desentralisasi Asimetris terkait keistimewaan belum jelas
- Upaya penggalan PAD terutama BUMD dan Retribusi masih lemah
- Manajemen Sumber Daya Manusia Belum Optimal (Penempatan Sumber Daya Manusia belum sesuai kompetensi)

# Keuangan Daerah (Analisis Kerangka Pendanaan)

(Edi S & Lita K)

# Analisa Pendapatan Daerah

Background Study RPJMD DIY 2017-2022



## Struktur Pendapatan Daerah DIY Tahun 2011-2015

Sumber: LKPJ DIY berbagai tahun (diolah)

## Perbandingan Derajat Desentralisasi Fiskal DIY dengan Provinsi Lainnya Tahun 2015

No	Provinsi	PAD (triliun)	Total Pendapatan (triliun)	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	Kriteria
1	Jateng	11,7	17,1	68,42%	Sangat Baik
2	Banten	5,13	7,64	67,15%	Sangat Baik
3	DKI Jakarta	40,36	60,44	66,78%	Sangat Baik
4	Jabar	15,85	23,91	66,29%	Sangat Baik
5	Kaltim	5,55	8,54	64,99%	Sangat Baik
6	Jatim	14,77	22,86	64,61%	Sangat Baik
7	Kalsel	3	4,71	63,69%	Sangat Baik
8	Bali	2,84	4,61	61,61%	Sangat Baik
9	Sumut	5,26	8,67	60,67%	Sangat Baik
10	Sulsel	3,38	6,17	54,78%	Sangat Baik
11	Lampung	2,34	4,7	49,79%	Baik
12	Kalbar	2,17	4,57	47,48%	Baik
13	Sumbar	1,75	3,95	44,30%	Baik
14	<b>Yogyakarta</b>	<b>1,45</b>	<b>3,42</b>	<b>42,40%</b>	<b>Baik</b>
15	Riau	3,66	8,72	41,97%	Baik
16	NTB	1,26	3,04	41,45%	Baik
17	Kalteng	1,4	3,46	40,46%	Baik
18	Sulut	1,03	2,56	40,23%	Baik
19	Sumsel	2,78	7,19	38,66%	Cukup
20	Jambi	1,22	3,29	37,08%	Cukup
21	Kepri	1,13	3,23	34,98%	Cukup
22	Bengkulu	0,7	2,2	31,82%	Cukup
23	Sulteng	0,88	2,77	31,77%	Cukup
24	Babel	0,58	1,9	30,53%	Cukup
25	Maluku	0,6	2,3	26,09%	Cukup
26	NTT	0,83	3,28	25,30%	Sedang
27	Sultra	0,53	2,26	23,45%	Sedang
28	Gorontalo	0,32	1,42	22,54%	Sedang
29	Kaltara	0,35	1,57	22,29%	Sedang
30	Sulbar	0,24	1,44	16,67%	Kurang
31	Aceh	1,88	12,01	15,65%	Kurang
32	Malut	0,25	1,83	13,66%	Kurang
33	Papua	0,88	11,36	7,75%	Sangat Kurang
34	Papua Barat	0,29	6,1	4,75%	Sangat Kurang

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri (Data APBD), diolah

# Analisa Pendapatan Daerah (lanjutan....)

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

## Tingkat Efektifitas Pendapatan DIY

Uraian	2013	2014	2015	Kategori Tahun 2015
PAD	105,66%	109,11%	104,89%	Sangat Efektif
Dana Perimbangan	99,29%	96,90%	96,71%	Efektif
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	75,40%	86,21%	100,35%	Sangat Efektif
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>97,17</b>	<b>99,50</b>	<b>101,26</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: LKPJ DIY berbagai tahun (diolah)

Kecendrungan Penurunan, mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah DIY dalam mengintervensi peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan semakin melemah

# Analisa Pendapatan Daerah (lanjutan....)

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

## Persentase Sumber Pendapatan DIY Tahun 2011-2015

Jenis Pendapatan	2011	2012	2013	2014	2015
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	54,17%	46,23%	47,08%	46,65%	46,86%
Pendapatan Pajak Daerah	84,32%	86,81%	87,44%	88,19%	87,74%
Pendapatan Retribusi Daerah	4,13%	3,40%	3,13%	3,04%	2,88%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,32%	3,53%	3,36%	3,29%	3,30%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,23%	6,26%	6,08%	5,47%	6,09%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	44,87%	41,19%	37,07%	32,29%	30,06%
Dana Bagi Hasil pajak/Bagi Hasil bukan pajak	11,36%	13,24%	9,89%	7,57%	6,09%
Dana Alokasi Umum	85,94%	84,63%	86,50%	88,77%	90,08%
Dana Alokasi Khusus	2,70%	2,13%	3,60%	3,66%	3,82%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0,96%	12,58%	15,85%	21,07%	23,09%
Pendapatan Hibah	40,86%	2,40%	2,51%	1,33%	1,50%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59,14%	97,60%	97,49%	98,67%	98,50%

Sumber: LKPJ DIY berbagai tahun

## Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
<b>Realisasi</b>	871.963.501.186,23	1.004.063.125.812,33	1.216.104.305.317,01	1.464.606.245.991,45	1.593.110.769.594,00	1.229.969.589.580,20
<b>Pertumbuhan</b>	13,49%	15,15%	21,12%	20,43%	8,77%	15,79%

Sumber: LKPJ DIY berbagai tahun (diolah)

## Pertumbuhan Pajak Daerah

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
<b>Realisasi</b>	735.226.105.916,20	871.630.605.393,00	1.063.314.117.923,00	1.291.665.050.808,00	1.397.772.209.370,00	1.071.921.617.882,04
<b>Pertumbuhan</b>	15,84%	18,55%	21,99%	21,48%	8,21%	17,21%

Sumber: LKPJ DIY berbagai tahun (diolah)

# Analisa Pendapatan Daerah (lanjutan....)

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

32

## Realisasi dan Kontribusi Komponen Pajak Daerah

No	Uraian	2013	K	2014	K	2015	K
1	Pajak Kendaraan Bermotor	458.210.055.800	43,09%	521.733.964.200	40,39%	580.298.749.000	41,52%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	441.929.215.350	41,56%	461.683.119.850	35,74%	411.908.125.820	29,47%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan	162.983.026.583	15,33%	203.174.965.469	15,73%	234.213.042.995	16,76%
4	Pajak Air Permukaan	191.820.190	0,02%	218.396.300	0,02%	277.381.200	0,02%
5	Pajak Rokok	-		104.854.604.989	8,12%	171.074.910.355	12,24%
	Jumlah	1.063.314.117.923	100,00%	1.291.665.050.808	100,00%	1.397.722.209.370	100,00%

70,99%

Jenis pajak ini tidak bisa diandalkan untuk peningkatan pendapatan jangka panjang:

- Kapasitas jalan
- Dampak lingkungan
- Kemacetan
- Kebijakan penggunaan transportasi massal

Sumber: LKPJ DIY berbagai tahun

Pemerintah Pusat mewajibkan Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan 50 persen penerimaan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok)

# Analisa Pendapatan Daerah (lanjutan....)

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

## Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Daerah

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
<b>Realisasi</b>	35.985.658.458,15	34.115.157.619,03	38.043.014.004,85	44.595.094.779,61	45.811.953.262,71	39.710.175.624,87
<b>Pertumbuhan</b>	9,59%	-5,20%	11,51%	17,22%	2,73%	7,17%
<b>Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD</b>	4,13%	3,40%	3,13%	3,04%	2,88%	3,31%

Sumber: LKPJ DIY Berbagai Tahun

## Rincian Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	2013	2014	2015
1	Retribusi Jasa Umum	5.401.513.409,62	6.554.368.147,00	6.336.414.859,00
2	Retribusi Jasa Usaha	31.917.226.395,23	37.039.056.133	38.487.692.603,71
3	Retribusi Perizinan Tertentu	724.274.200,00	1.001.670.500	987.845.800,00
	Jumlah	38.043.014.004,85	44.595.094.779,61	45.811.953.262,71

Sumber: LKPJ DIY Berbagai Tahun

**Peluang:** kewenangan Pemerintah DIY menjadi lebih besar setelah ditetapkannya UU No.23 Tahun 2014, diantaranya adalah pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor kehutanan, pertambangan dan perikanan-kelautan.

# Analisa Pendapatan Daerah (lanjutan....)

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

## Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Realisasi	28.961.383.472,76	35.492.532.563,21	40.817.517.188,12	48.247.880.493,70	52.502.631.979,68	44.265.140.556,18
Pertumbuhan	9,98%	22,55%	15,00%	18,20%	8,82%	14,91%
Kontribusi Terhadap PAD	3,32%	3,53%	3,36%	3,29%	3,30%	3,36%

## Perbandingan Penyertaan Modal dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	2011	2012	2013	2014	2015
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	2.600.000.000,00	32.275.000.000,00	94.593.950.276,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisah	28.961.383.472,76	35.492.532.563,21	40.817.517.188,12	48.247.880.493,70	52.502.631.979,68
<b>Selisih</b>	<b>26.361.383.472,76</b>	<b>3.217.532.563,21</b>	<b>-53.776.433.087,88</b>	<b>-1.752.119.506,30</b>	<b>2.502.631.979,68</b>

## Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	2012	2013	2014	2015
<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>31.847.911.495,00</b>	<b>36.836.222.015,50</b>	<b>43.660.944.929,24</b>	<b>47.637.188.457,77</b>
Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)	86.302.400,00	682.966.411,00	40.404.234,00	493.207.600,00
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)	31.761.609.095,00	36.153.255.604,50	43.220.540.695,24	46.643.980.857,77
Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)	0	0	400.000.000,00	500.000.000,00
<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta</b>	<b>427.202.606,00</b>	<b>553.388.147,00</b>	<b>621.882.993,00</b>	<b>650.274.664,00</b>
PT. Yogya Indah Sejahtera (PT. YIS)	335.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00
PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)	92.202.606,00	98.388.147,00	166.882.993,00	195.274.664,00
<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank</b>	<b>3.217.418.462,19</b>	<b>3.427.907.025,62</b>	<b>3.965.052.571,46</b>	<b>3.965.052.571,46</b>
Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	3.217.418.462,19	3.427.907.025,62	3.965.052.571,46	3.965.052.571,46
<b>Jumlah Total</b>	<b>35.492.532.563,19</b>	<b>40.817.517.188,12</b>	<b>48.247.880.493,70</b>	<b>52.252.515.693,23</b>

Sumber: CALK berbagai tahun

# Analisa Pendapatan Daerah (lanjutan....)

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

## Perbandingan Rencana dengan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	2014			2015		
	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	43.473.415.561,24	43.660.944.929,24	100,43%	47.637.191.957,77	47.637.188.457,77	100,00%
Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)	88.400.000,00	40.404.234,00	45,71%	493.211.100,00	493.207.600,00	100,00%
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)	43.220.540.695,24	43.220.540.695,24	100,00%	46.643.980.857,77	46.643.980.857,77	100,00%
Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)	164.474.866,00	400.000.000,00	243,20%	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	621.882.993,00	621.882.993,00	100,00%	553.388.147,00	650.274.664,00	117,51%
PT. Yogya Indah Sejahtera (PT. YIS)	455.000.000,00	455.000.000,00	100,00%	455.000.000,00	455.000.000,00	100,00%
PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)	166.882.993,00	166.882.993,00	100,00%	98.388.147,00	195.274.664,00	198,47%
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank	3.968.646.264,08	3.965.052.571,46	99,91%	3.968.646.264,08	3.965.052.571,46	99,91%
Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	3.968.646.264,08	3.965.052.571,46	99,91%	3.968.646.264,08	3.965.052.571,46	99,91%
Jumlah Total	48.063.944.818,32	48.247.880.493,70	100,38%	52.159.226.368,85	52.252.515.693,23	100,18%

Mohon Informasi Lebih lanjut....



**Peningkatan kemampuan BUMD masih harus terus dilakukan agar BUMD dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan.**

# Analisa Pendapatan Daerah (lanjutan....)

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

## Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
<b>Realisasi</b>	71.790.353.339,12	62.824.830.237,09	73.929.656.201,04	80.098.219.910,14	97.023.974.981,61	78.469.170.332,47
<b>Pertumbuhan</b>	-3,59%	-12,49%	17,68%	8,34%	21,13%	6,22%
<b>Kontribusi Terhadap PAD</b>	8,23%	6,26%	6,08%	5,47%	6,09%	6,43%

## Realisasi Komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2015

No	Uraian	Realisasi	Kontribusi
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	3.348.288.921,00	3,45%
2	Penerimaan Jasa Giro	12.957.505.231,91	13,35%
3	<b>Pendapatan Bunga Deposito</b>	<b>30.340.659.699,02</b>	<b>31,27%</b>
4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	783.646.246,81	0,81%
5	Pendapatan Denda Retribusi	7.092.870,00	0,01%
6	Pendapatan Dari Pengembalian	861.202.254,00	0,89%
7	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8.679.169.000,00	8,95%
8	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	270.187.900,00	0,28%
9	<b>Pendapatan dari Pengelolaan BLUD</b>	<b>22.715.677.908,00</b>	<b>23,41%</b>
10	Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	406.090.883,72	0,42%
11	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.089.298.490,00	7,31%
12	Pendapatan Daerah lain-lain	2.658.589.062,00	2,74%
13	Pendapatan Daerah lain-lain	142.577.111,11	1,50%
14	Lain-Lain	5.466.990.473,24	5,63%
	Jumlah	97.023.974.981,61	100,00%

**A. MARDIANSYAH**

# Analisa Pendapatan Daerah (lanjutan....)

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

## Pertumbuhan Dana Perimbangan

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Realisasi	722.339.653.053,00	894.544.324.851,00	957.561.850.914,00	1.013.811.389.590,00	1.021.886.268.197,00	971.950.958.388,00
Pertumbuhan	15,27%	23,84%	7,04%	5,87%	0,80%	10,56%
Kontribusi Terhadap Total Pendapatan	44,87%	41,19%	37,07%	32,29%	30,06%	37,10%

## □ Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Realisasi	82.037.725.053,00	118.434.888.851,00	94.731.182.914,00	76.756.229.590,00	62.257.506.197,00	88.044.951.888,00
Pertumbuhan	-6,59%	44,37%	-20,01%	-18,97%	-18,89%	-4,02%
Kontribusi Terhadap Dana Perimbangan	11,36%	13,24%	9,89%	7,57%	6,09%	9,63%

## □ Dana Alokasi Umum

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Realisasi	620.812.328.000,00	757.056.696.000,00	828.334.768.000,00	899.923.550.000,00	920.544.722.000,00	851.464.934.000,00
Pertumbuhan	17,70%	21,95%	9,42%	8,64%	2,29%	12,00%
Kontribusi Terhadap Dana Perimbangan	85,94%	84,63%	86,50%	88,77%	90,08%	87,19%

## □ Dana Alokasi Khusus

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Realisasi	19.489.600.000,00	19.052.740.000,00	34.495.900.000,00	37.131.610.000,00	39.084.040.000,00	32.441.072.500,00
Pertumbuhan	71,20%	-2,24%	81,05%	7,64%	5,26%	32,58%
Kontribusi Terhadap Dana Perimbangan	2,70%	2,13%	3,60%	3,66%	3,82%	3,18%

# Analisa Pendapatan Daerah (lanjutan....)

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

## Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Realisasi	15.458.293.000,00	273.125.217.000,00	409.392.162.993,00	661.455.536.627,00	785.017.773.985,00	532.247.672.651,25
Pertumbuhan	89,54%	1666,85%	49,89%	61,57%	18,68%	377,31%
Kontribusi Terhadap Total Pendapatan	0,96%	12,58%	15,85%	21,07%	23,09%	14,71%

## ❖ Pertumbuhan Pendapatan Hibah

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Realisasi	6.315.972.000,00	6.567.337.000,00	10.291.886.370,00	8.822.952.137,00	11.740.118.046,00	9.355.573.388,25
Pertumbuhan	20,70%	3,98%	56,71%	-14,27%	33,06%	20,04%
Kontribusi Terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40,86%	2,40%	2,51%	1,33%	1,50%	9,72%

## ❖ Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Realisasi	9.142.321.000,00	266.557.880.000,00	399.100.276.623,00	652.632.584.490,00	773.277.655.930,00	522.892.099.263,00
Pertumbuhan	212,77%	2815,65%	49,72%	63,53%	18,49%	632,03%
Kontribusi Terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	59,14%	97,60%	97,49%	98,67%	98,50%	90,28%

Sumber: LKPJ DIY Berbagai Tahun

# Analisa Pendapatan Daerah (lanjutan....)

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

## Dana Keistimewaan

### Anggaran dan Realisasi Dana Keistimewaan

Urusan	2013			2014			2015		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur				400.000.000	229.572.000	57,39%			
Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	2.516.142.500	991.053.700	39,39%	1.676.000.000	1.344.217.482	80,20%	1.650.000.000	1.476.455.568,00	89,48%
Kebudayaan	212.546.511.000	47.828.661.143	22,50%	375.178.719.000	210.503.704.163	56,11%	420.800.000.000	356.314.922.039,00	84,68%
Pertanahan	6.300.000.000	4.432.433.160	70,36%	23.000.000.000	7.342.138.878	31,92%	10.600.000.000	9.390.386.050,00	88,59%
Tata Ruang	10.030.000.000	1.310.032.050	13,06%	123.620.000.000	52636975766	42,58%	114.400.000.000	110.312.751.509,00	96,43%
<b>Jumlah</b>	<b>231.392.653.500</b>	<b>54.562.180.053</b>	<b>23,58%</b>	<b>523.874.719.000</b>	<b>272.056.608.289</b>	<b>51,93%</b>	<b>547.450.000.000</b>	<b>477.494.515.166</b>	<b>87,22%</b>

Sumber: Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahun 2013, 2014, dan 2015.

# Analisa Pendapatan Daerah (lanjutan....)

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

## Kendala Penggunaan Dana Keistimewaan

2013	2014	2015
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terdapatnya musim yang kehilangan momen untuk dilaksanakan yakni masa tanam yang terlewatkan dimana masyarakat sudah menanam sementara hibah sarana produksi kepada petani belum bisa dilaksanakan. Masa tanam yang tergantung dengan iklim dalam hal ini hujan telah terjadi pada waktu anggaran dana keistimewaan disahkan.</li> <li>❖ Adanya fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar AS menyebabkan anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan harga pada waktu perencanaan dan beberapa kegiatan pengadaan belanja barang dan jasa tertentu tidak dapat dilaksanakan, sebagai contoh hal ini terjadi pada SKPD BPPM dan Biro Umum Humas dan Protokol.</li> <li>❖ PMK terbit terlambat yang melampaui waktu perencanaan dana keistimewaan</li> </ul> <p>A. Mardiansyah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kekurangan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dan pengelolaan keuangan.</li> <li>❖ Ketidaksiapan dan kekhawatiran dari PA dan KPA terkait pengadaan barang dan jasa. terutama bagi Kabupaten/Kota. Selama ini pengadaan barang dan jasa dianggap sebagai aktivitas yang beresiko bagi panitia pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen. hal itu menyebabkan para pegawai yang bersangkutan melakukan langkah hati-hati dalam melaksanakan proses pengadaannya;</li> <li>❖ Pada Pelaksanaan konstruksi dan pembangunan fisik pada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala faktor keterbatasan waktu.</li> <li>❖ Keterlambatan penyusunan masterplan sehingga untuk penyusunan DED tidak dapat dilaksanakan.</li> <li>❖ Pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berlaku belum ada kesamaan. Pemahaman yang berbeda tersebut menyebabkan adanya proses koordinasi dan penselarasan pemikiran yang menyebabkan pelaksanaan aktivitas yang terkait dengan aturan tersebut terlambat dilakukan;</li> <li>❖ Terjadinya gagal lelang pada beberapa proses pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut antara lain disebabkan persyaratan lembaga/konsultan yang berpengalaman untuk menangani BCB yang sangat terbatas. Dengan adanya gagal lelang dan keharusan lelang ulang berakibat waktu menjadi sangat terbatas dan tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik.</li> </ul> <p>Background Study RPJMD DIY</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dinamisnya proses pengadaan tanah yang tidak linier</li> <li>❖ Ketergantungan terhadap pihak eksternal</li> <li>❖ Beban kerja dibanding dengan kapasitas SDM (kuantitas)</li> <li>❖ Proses adaptasi terhadap sistem prosedur pelaksanaan.</li> <li>❖ Kendala realisasi terkait hibah kepada masyarakat berupa barang/ peralatan pada Disbudpar Kabupaten Gunungkidul, Disbudpar Bantul, dan Disperindagkop UKM DIY. KPA ragu-ragu untuk merealisasikan sesuai Surat Gubernur Nomor 900/8527 Tanggal 24 Agustus 2015 perihal Penajaman Ketentuan tentang Hibah. Surat tersebut merupakan penajaman atas Surat Edaran Kemendagri Nomor 900/4627/SJ tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>❖ Kendala rentang kendali pada Kuasa Penguasa Anggaran (KPA). Kendala rentang kendali tersebut dapat dilihat dari aspek jumlah KPA yang terlampaui banyak, terutama pada Urusan Kebudayaan. Kendala rentang kendali juga dapat dilihat pada tingkat eselon yang menangani Dana Keistimewaan. Ditemukan beberapa KPA dijabat bukan oleh Kepala SKPD tetapi oleh eselon III setingkat Kepala Bidang. Kendala tersebut terkait dengan pengambilan keputusan dan pola koordinasi.</li> <li>❖ Kurangnya komitmen dari sebagian kecil dari kuasa pengguna anggaran pengampu Dana Keistimewaan.</li> <li>❖ Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan.</li> <li>❖ Pengadaan tanah/ bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta salah satunya karena nilai appraisal atas aset tersebut tidak mencukupi harga yang diminta pemilik bangunan.</li> <li>❖ Pada urusan pertanahan, dari aspek perencanaan luasan lahan yang akan diidentifikasi belum jelas keluasannya sehingga berdampak terhadap penyerapan anggaran.</li> <li>❖ Pada urusan tata ruang kendala yang dihadapi antara lain saat pengadaan barang dan jasa (proses pelelangan), negosiasi dengan pemilik lahan pada saat pengadaan tanah</li> </ul> <p>40</p>

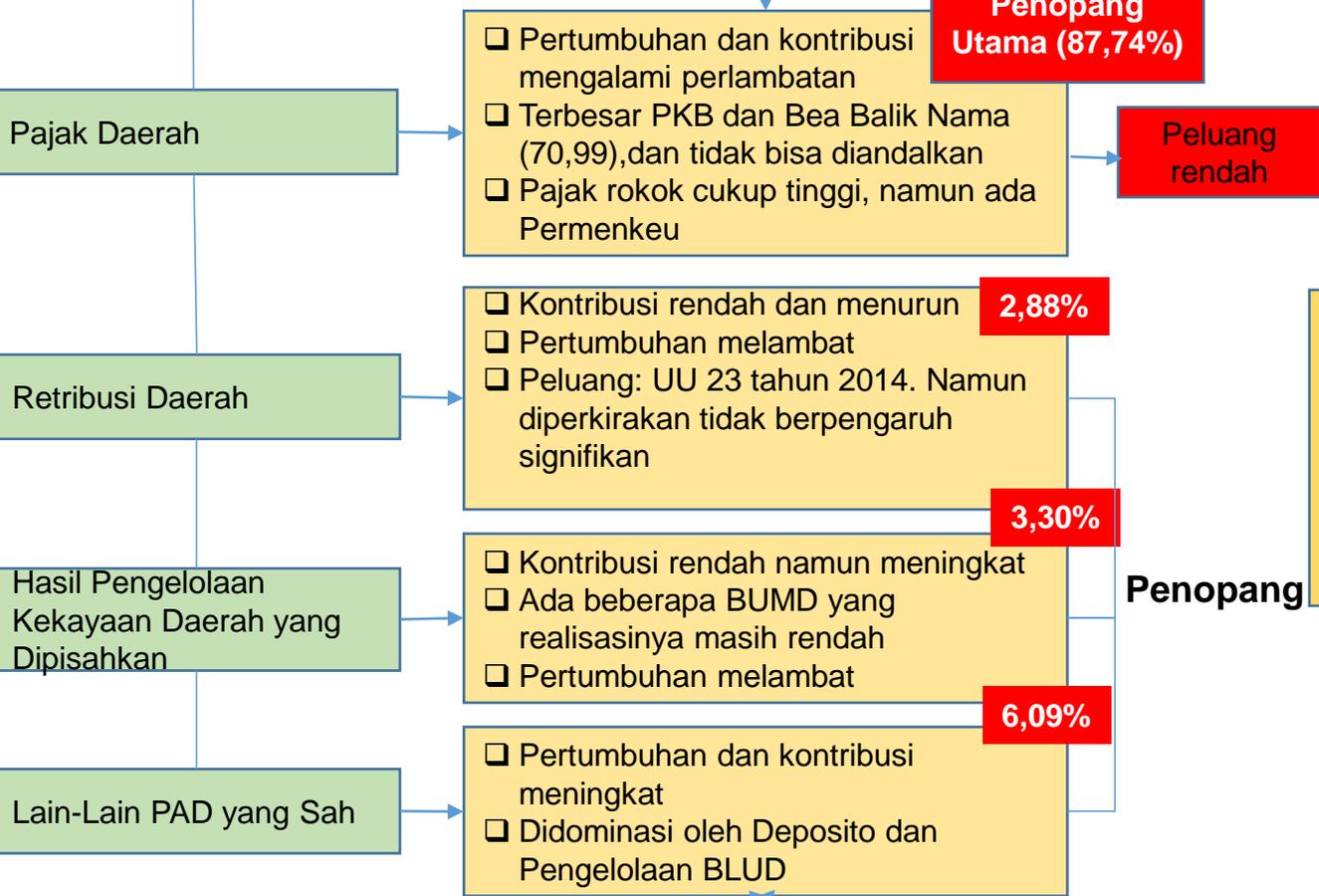
# Simpulan Analisa Pendapatan Daerah

## Background Study RPJMD DIY 2017-2022

### PAD

ekonomi mengalami peningkatan, namun tumbuh lambat (sumber: Analisa makro ekonomi)

Pertumbuhan dan kontribusi melambat



Penopang

Peluang rendah

UU 23 tahun 2014

### Arah Kebijakan

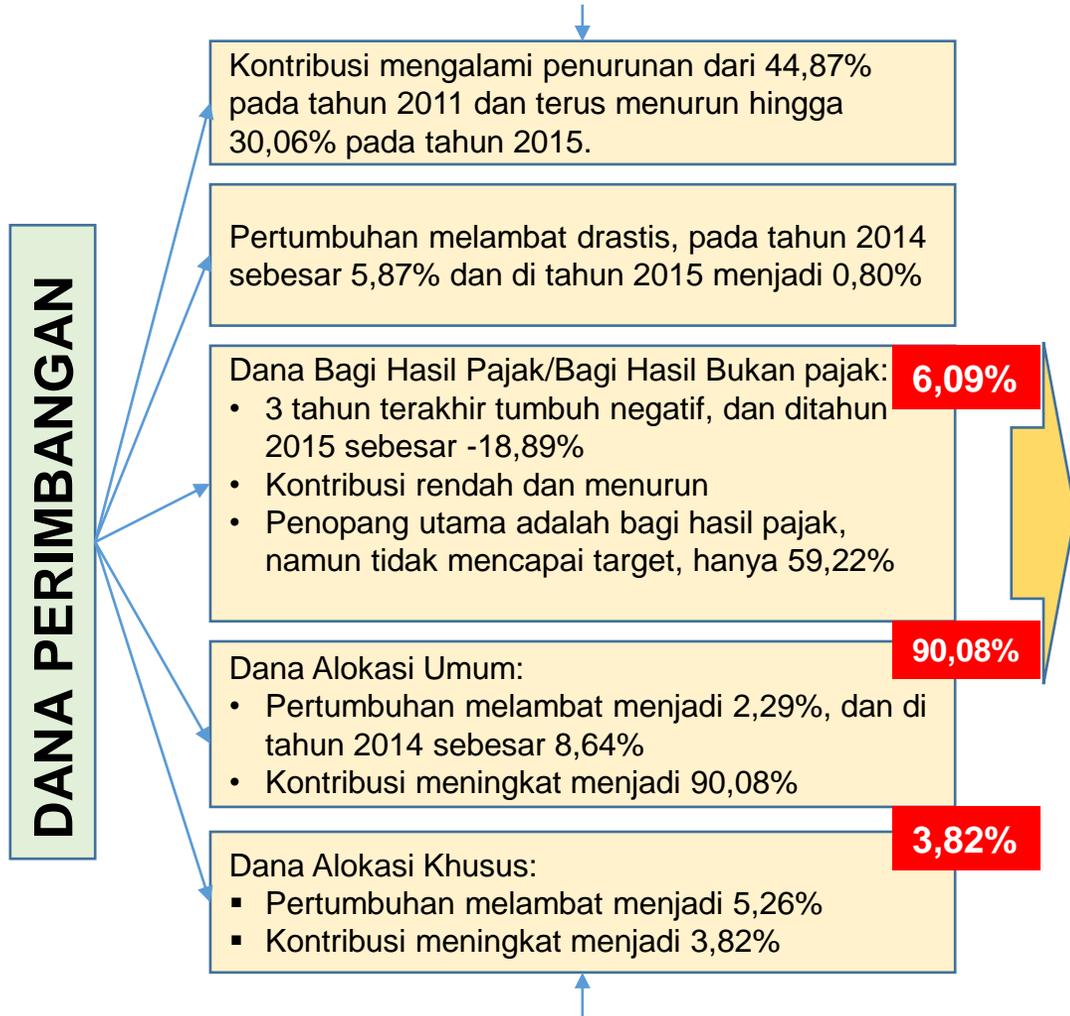
- Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
- Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha melalui Perubahan Perda No.5 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal BUMD yaitu Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2016, sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMD disertai dengan Penataan Kelembagaan BUMD dan Pengembangan Manajemen BUMD.
- Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling dan sistem online kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS online berbasis accrual pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah
- Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak
- Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD Di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan *reward and punishment*
- Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat
- Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah
- Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak

Penentuan target di tahun mendatang cukup berhati-hati dan jauh dari kesan "muluk-muluk", diperkirakan PAD di tahun mendatang masih tetap tumbuh namun mengalami perlambatan.

# Simpulan Analisa Pendapatan Daerah

## Background Study RPJMD DIY 2017-2022

Mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan pencapaian target penerimaan (realisasi tidak sesuai target) selama 3 tahun terakhir



Kemampuan Pemerintah DIY dalam mengintervensi peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan semakin melemah

### Arah Kebijakan

- ❑ Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- ❑ Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penentuan target di tahun mendatang cukup berhati-hati dan jauh dari kesan “muluk-muluk”, diperkirakan di tahun mendatang masih tetap tumbuh namun mengalami perlambatan.

# Simpulan Analisa Pendapatan Daerah

## Background Study RPJMD DIY 2017-2022

Dana Keistimewaan di tahun 2017 diperkirakan meningkat menjadi Rp.800 milyar (UU NO.18 tahun 2016 tentang APBN TA.2017)



# Analisa Belanja Daerah

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

## Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah

Jenis Belanja	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
Belanja Tidak Langsung	1.440.388.140.091,78	1.560.158.355.863,47	1.810.940.126.778,80	12,19%
Belanja Pegawai	491.078.831.946,00	512.499.970.976,00	540.817.461.612,00	4,94%
Belanja Hibah	437.072.068.425,00	441.914.970.000,00	562.260.178.868,00	14,17%
Belanja Bantuan Sosial	12.509.468.500,00	9.919.078.000,00	7.073.500.000,00	-24,70%
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	376.702.290.858,78	472.309.827.352,47	583.092.613.250,80	24,42%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	123.025.480.362,00	121.560.574.535,00	117.696.373.048,00	-2,18%
Belanja Tidak Terduga	0,00	1.953.935.000,00	0,00	
Belanja Langsung	1.069.181.078.251,57	1.420.909.964.557,94	1.685.524.627.437,65	25,76%
Belanja Pegawai	143.754.843.434,00	111.424.291.684,00	128.971.492.274,00	-3,37%
Belanja Barang & Jasa	556.030.440.778,57	866.939.220.272,94	928.950.949.598,65	31,53%
Belanja Modal	369.395.794.039,00	442.546.452.601,00	627.602.185.565,00	30,81%
Total Belanja	2.509.569.218.343,35	2.981.068.320.421,41	3.496.464.754.216,45	18,04%

Kenaikan belanja daerah menggambarkan bahwa kebutuhan pemerintah daerah dalam pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi anggaran agar tingginya penyerapan anggaran berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan.

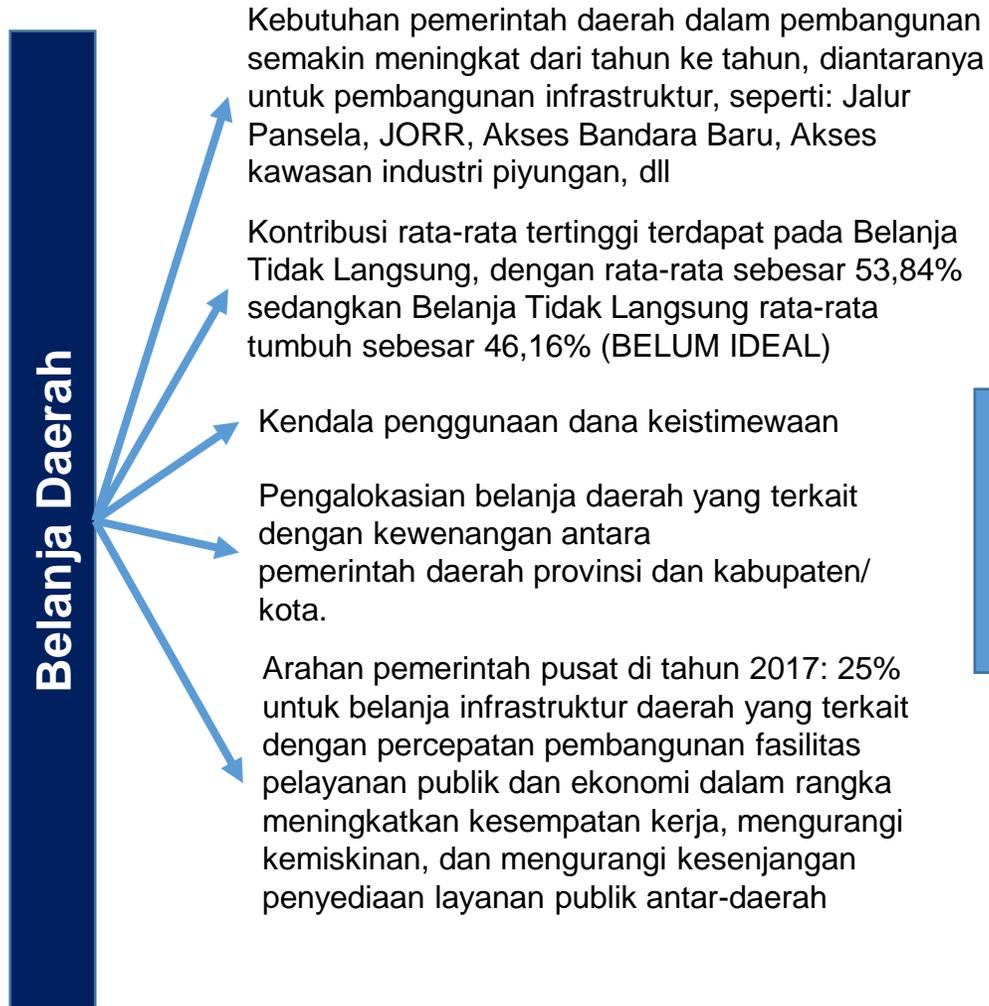
## Proporsi Belanja Daerah Tahun 2013-2015

Jenis Belanja	2013	2014	2015	Rata-Rata Kontribusi
Belanja Tidak Langsung	57,40%	52,34%	51,79%	53,84%
Belanja Pegawai	34,09%	32,85%	29,86%	32,27%
Belanja Hibah	30,34%	28,33%	31,05%	29,91%
Belanja Bantuan Sosial	0,87%	0,64%	0,39%	0,63%
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	26,15%	30,27%	32,20%	29,54%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	8,54%	7,79%	6,50%	7,61%
Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,13%	0,00%	0,04%
Belanja Langsung	42,60%	47,66%	48,21%	46,16%
Belanja Pegawai	13,45%	7,84%	7,65%	9,65%
Belanja Barang & Jasa	52,01%	61,01%	55,11%	56,04%
Belanja Modal	34,55%	31,15%	37,23%	34,31%

Kontribusi rata-rata tertinggi terdapat pada Belanja Tidak Langsung, dengan rata-rata sebesar 53,84% sedangkan Belanja Tidak Langsung rata-rata tumbuh sebesar 46,16%. **Angka ini belum menunjukkan prinsip keadilan. Secara ideal komposisi belanja langsung dan tidak langsung adalah 70% dan 30% atau minimal 60% dan 40%.**

# Analisa Belanja Daerah

Background Study RPJMD DIY 2017-2021



## KEBIJAKAN

### Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan mempercepat penyerapan anggaran untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan wilayah.

### Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

### Optimalisasi Koordinasi dan Sinkronisasi

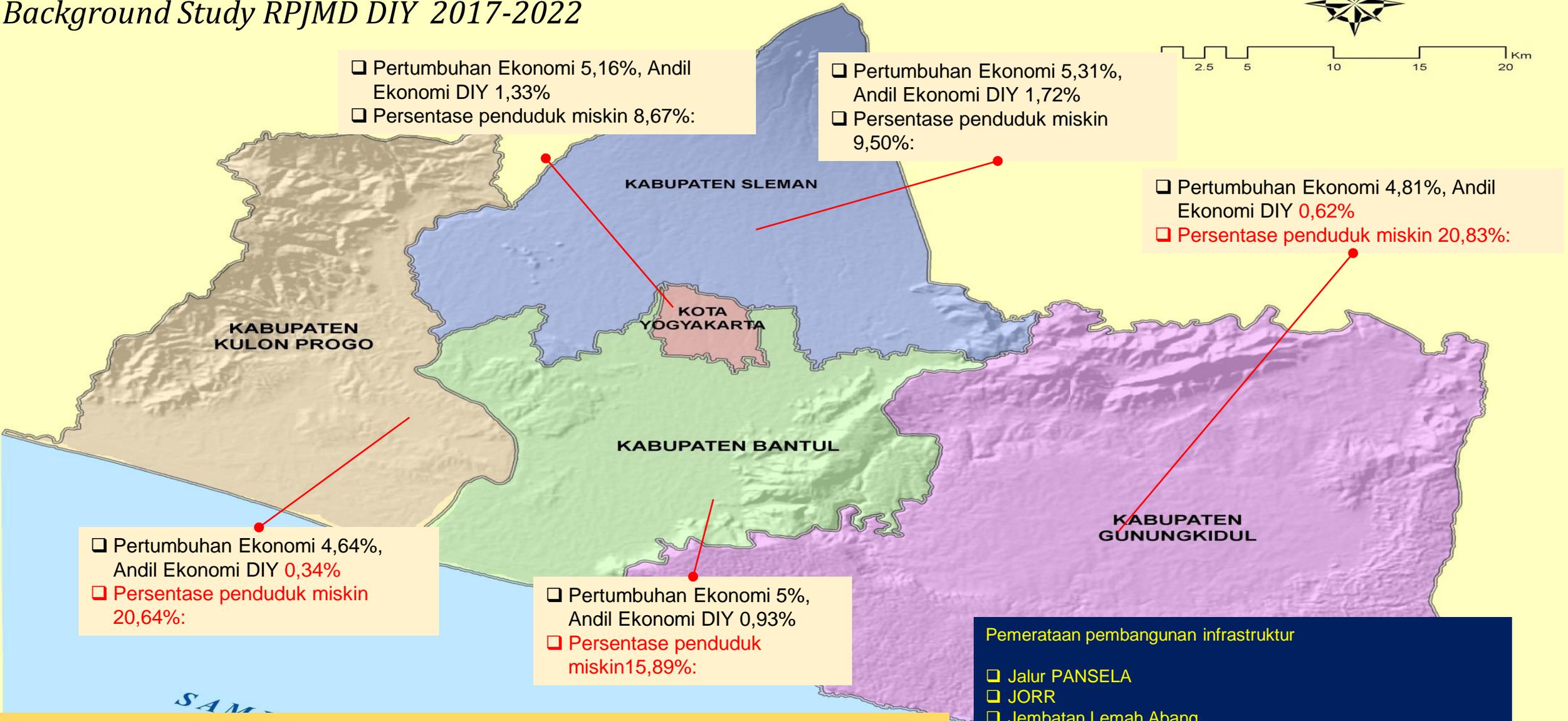
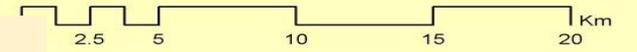
Di optimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral maupun antara SKPD Pemerintah DIY dengan SKPD Kabupaten/ Kota berkaitan kewenangan dan perkembangan regulasi.

### Optimalisasi penggunaan dana keistimewaan

Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dilakukan dengan peningkatan koordinasi antar stakeholder, menyusun regulasi baru dan merealisasikan program kegiatan sesuai dengan kemampuan pelaksana, dan mengusulkan batasan pelaksanaan verifikasi laporan kinerja ke Pemerintah.

# Urgensi Pembangunan Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah DIY

## Background Study RPJMD DIY 2017-2022



□ Pertumbuhan Ekonomi 5,16%, Andil Ekonomi DIY 1,33%  
□ Persentase penduduk miskin 8,67%:

□ Pertumbuhan Ekonomi 5,31%, Andil Ekonomi DIY 1,72%  
□ Persentase penduduk miskin 9,50%:

□ Pertumbuhan Ekonomi 4,81%, Andil Ekonomi DIY 0,62%  
□ Persentase penduduk miskin 20,83%:

□ Pertumbuhan Ekonomi 4,64%, Andil Ekonomi DIY 0,34%  
□ Persentase penduduk miskin 20,64%:

□ Pertumbuhan Ekonomi 5%, Andil Ekonomi DIY 0,93%  
□ Persentase penduduk miskin 15,89%:

### Pemerataan pembangunan infrastruktur

- Jalur PANSELA
- JORR
- Jembatan Lemah Abang
- Akses Bandara Baru
- Kawasan Industri Piyungan Bantul
- Pembangunan Bendung Kamijoro
- DII

□ Indeks Gini DIY selama periode 1999-2015 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Peningkatan indeks ini menggambarkan distribusi pendapatan antar penduduk yang semakin tidak merata. Dibandingkan dengan level nasional, nilai indeks Gini DIY terlihat lebih tinggi atau distribusinya lebih timpang.

□ Perkembangan Indeks Wiliamson 2008-2015 semakin meningkat. 0,4435 tahun 2008 dan 2015 menjadi 0,4693

# Analisa Belanja Daerah

## Background Study RPJMD DIY 2017-2022

### SKEMA PENDANAAN Proyek-proyek Investasi

Fokus pembangunan diarahkan pada pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan dana sangat besar

Beberapa mega proyek infrastruktur yang akan dibangun dan dikembangkan pada tahun 2017-2022 sebagai

keberlanjutan implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah pada Tahun 2012-2017, seperti:

- ❑ Pembangunan Bandar Udara Kulonprogo,
- ❑ Tindaklanjut Pembangunan Tanjung Adikarto, Penyelesaian Jalur PANSELA
- ❑ Pengembangan Transportasi Umum Massal (Kereta Api Pendukung Bandara termasuk dalam hal ini pembangunan Mono Rail Transport, Pengembangan Bus Rapid Transit), dan lain sebagainya.

### ALTERNATIF SKEMA PENDANAAN

1

**Investasi Pemerintah:** Proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor

2

**Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS):** Untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

3

**Investasi Swasta:** proyek-proyek yang diminati oleh pihak swasta adalah sektor-sektor transportasi yang sudah bersifat komersial yang memiliki nilai kelayakan secara finansial.

4

**Creative financing sebagai pembiayaan alternatif adalah** sebagai berikut:

- a) *Infrastructure Bond* yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
- b) Penugasan BUMN/BUMD yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan *direct-lending* yang dijamin oleh pemerintah;
- c) *Private Finance Initiative (PFI)*– multi-year contract 15 hingga 30 tahun;
- d) *Performance-Based Annuity Scheme (PBAS)* atau *Availability Payment*;
- e) Pengenaan tarif/biaya akses seperti *Electronic Road Pricing (ERP)*;
- f) Infrastruktur swasta (*private infrastructure*);
- g) Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*).

# Analisa Pembiayaan Daerah

Background Study RPJMD DIY 2017-2022

2,84%: kategori rendah

## Pembiayaan dan SILPA

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan	1.604.910.831.405,87	2.171.734.307.663,33	2.583.057.303.524,01	3.139.871.880.417,16	3.400.014.811.777,00
Belanja dan Transfer	1.562.268.734.645,00	2.058.825.959.467,00	2.509.643.915.218,35	2.981.068.320.421,41	3.496.425.502.266,45
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>42.642.096.760,87</b>	<b>112.908.348.196,33</b>	<b>73.413.388.305,66</b>	<b>158.803.559.995,75</b>	<b>-96.410.690.489,45</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	232.076.541.506,36	269.529.213.643,23	379.241.941.052,56	382.020.096.897,50	498.330.738.232,25
Pencairan Dana Cadangan			3.224.600.842,28		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.885.008.000,00				
Penerimaan Kembali Investasi Dana Non Permanen Lainnya		23.019.937.048,00	20.367.526.960,00	7.507.081.339,00	12.762.380.275,00
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1.270.414.276,00	1.059.442.165,00	366.590.013,00		
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>254.231.963.782,36</b>	<b>293.608.592.856,23</b>	<b>403.200.658.867,84</b>	<b>389.527.178.236,50</b>	<b>511.093.118.507,25</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.600.000.000,00	32.275.000.000,00	94.593.950.276,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	23.225.000.000,00				
	1.519.846.900,00				
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>27.344.846.900,00</b>	<b>32.275.000.000,00</b>	<b>94.593.950.276,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>226.887.116.882,36</b>	<b>261.333.592.856,23</b>	<b>308.606.708.591,84</b>	<b>339.527.178.236,50</b>	<b>461.093.118.507,25</b>
<b>SILPA</b>	<b>269.529.213.643,23</b>	<b>374.241.941.052,56</b>	<b>382.020.096.897,50</b>	<b>498.330.738.232,25</b>	<b>364.682.428.017,80</b>

Sumber: CALK DIY berbagai tahun

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas maksimal Kumulatif Pinjaman daerah Tahun Anggaran 2017:

Sangat Tinggi: 5,25% dari perkiraan pendapatan daerah

Tinggi: 4,25% dari perkiraan pendapatan daerah

Sedang: 3,25% dari perkiraan pendapatan daerah

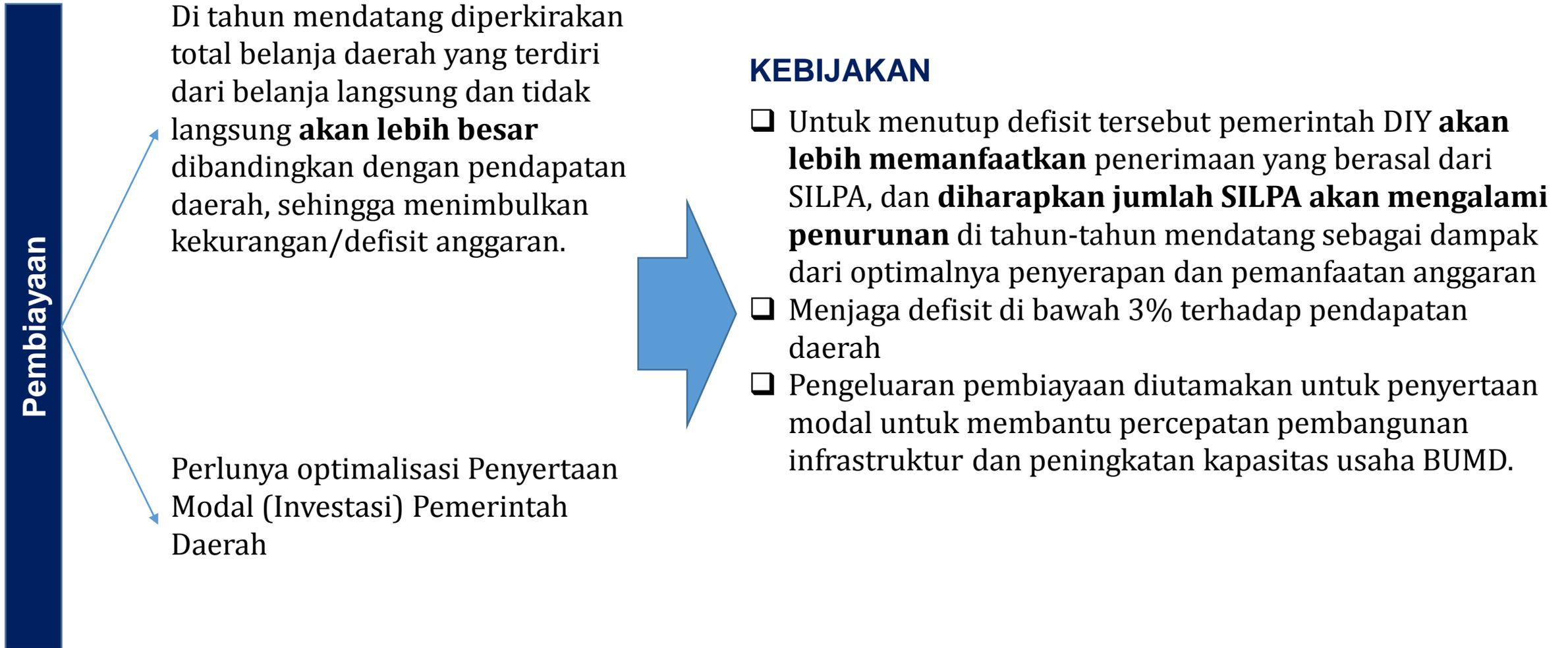
Rendah: 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah

Background Study RPJM DIY

Upaya optimalisasi sudah dilakukan diantaranya dengan melakukan penganggaran yang defisit sebesar 200 milyar pada tahun 2015,2016, dan 2017 (RKPD 2017), mengakomodir lebih banyak kebutuhan publik dalam APBD

# Analisa Pembiayaan Daerah

Background Study RPJMD DIY 2017-2022



# Bidang Perekonomian

(Rusman R. Manik)

# Fokus Bidang Perekonomian

# Super Pro Poor Growth

Pertumbuhan ekonomi (yang berhasil) meningkatkan pendapatan riil perkapita, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan

- Pengembangan **sektor** yg menjadi tempat mayoritas penduduk miskin bekerja, seperti **sektor** pertanian dalam arti luas.
- Pembangunan **wilayah (area)** yg menjadi tempat tinggal mayoritas masyarakat miskin, seperti **wilayah tertinggal (kantong kemiskinan)**
- Optimalisasi **faktor produksi** yg dimiliki oleh masyarakat miskin, seperti **tenaga kerja** yg kurang terlatih.
- Peningkatan produktivitas output yg **dikonsumsi (dibutuhkan)** oleh masyarakat miskin, seperti **komoditas makanan**.

# Fokus Bidang Perekonomian Super Pro Poor Growth

1. **PANGAN:** Terwujudnya Kab/Kota mandiri dan berdaulat pangan di DIY
2. **PERTANIAN:** Meningkatnya produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani (NTP).
3. **KUKM:** Terwujudnya KUKM yg berdaya saing, mandiri dan memiliki kemitraan (*linkage*) antarusaha dan antarsektor, untuk penguatan fundamental perekonomian dalam taskin peningkatan kesra di DIY
4. **PENANAMAN MODAL:** Realisasi penanaman modal yg sesuai potensi wilayah penguatan fundamental perekonomian dalam taskin peningkatan kesra di DIY
5. **KELAUTAN DAN PERIKANAN:** Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar sektor perikanan dan kelautan di DIY.

# Fokus Bidang Perekonomian Super Pro Poor Growth

6. **PARIWISATA**: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam penguatan fundamental perekonomian dalam taskin peningkatan kesra di DIY
7. **PERDAGANGAN**: Meningkatnya stabilitas perdagangan, pengendalian inflasi daerah dan ketersediaan sembako di DIY
8. **PERINDUSTRIAN**: Berkembangnya sektor industri yg mandiri untuk penguatan fundamental perekonomian dalam taskin peningkatan kesra di DIY
9. **KEHUTANAN**: Meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan dan kelestarian hutan dan jasa lingkungan kehutanan di DIY

# Permasalahan di Tingkat Daerah

ARAH KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN	INTERPRETASI Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	PERMASALAHAN
Super Pro Poor Growth	<	Belum optimalnya pencapaian target arah kebijakan TIAP sektoralnya, yaitu: <a href="#">slide #51 - #52</a>
		Belum optimalnya peran KORBINWAS dalam peningkatan sinergisasi pembangunan sektoral

# PERMASALAHAN DI BIDANG PANGAN

FOKUS: Terwujudnya Kab/Kota mandiri dan berdaulat pangan di DIY

- Rendahnya produktivitas sektor pertanian, dalam arti luas, di DIY untuk mendukung ketersediaan bahan pangan
- Masih tingginya kendala distribusi pangan
- Pola pangan harapan yang belum sesuai dengan kondisi idealnya
- Tingginya Pertumbuhan penduduk
- Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
- Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengembangan potensi sumber daya lokal dalam mendukung ketahanan pangan.
- Belum optimalnya peran Kab/Kota dalam mewujudkan Kab/Kota Mandiri dan berdaulat pangan
- Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan Daerah

# PERMASALAHAN DI BIDANG PERTANIAN

FOKUS: Meningkatnya produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani (NTP)

- Tingginya harga input pertanian
- Keterbatasan ketersediaan lahan
- Rendahnya stabilitas harga pangan
- Rendahnya sinergitas pembangunan sektor Pertanian
- Rendahnya adaptasi poktan terhadap anomali iklim
- Rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh petani
- Pada umumnya petani berusia lanjut dan tingkat pendidikannya rendah
- Belum optimalnya peran penyuluhan dalam peningkatan produktivitas.

# PERMASALAHAN DI BIDANG PERIKANAN KELAUTAN

FOKUS: Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar sektor perikanan dan kelautan di DIY

- Penerapan Mina Bisnis dan Mina Industri yang belum berkembang
- Rendahnya aksesibilitas pada permodalan
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Biaya melaut yang relatif masih tinggi, baik karena mahalnnya biaya bahan bakar maupun akibat dari jauhnya jangkauan melaut.

# PERMASALAHAN DI BIDANG KUKM

FOKUS: Terwujudnya KUKM yg berdaya saing, mandiri dan memiliki kemitraan (*linkage*) antarusaha dan antarsektor, untuk penguatan fundamental perekonomian dalam taskin peningkatan kesra di DIY

- Rendahnya cakupan pasar KUKM
- Rendahnya inovasi produk KUKM
- Rendahnya sinergitas pembangunan sektor KUKM
- Belum berkembangnya kemitraan antar usaha dan antar sektor hasil inisiatif pengusaha
- Rendahnya aksesibilitas KUKM terhadap modal
- Rendahnya animo masyarakat terhadap produk KUKM lokal

# PERMASALAHAN DI BIDANG PARIWISATA

**FOKUS:** Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam penguatan fundamental perekonomian dalam taskin peningkatan kesra di DIY

- Belum optimalnya pengelolaan Destinasi Pariwisata (reputasi, keunikan dan keunggulan lainnya)
- Daya dukung kawasan perkotaan (Kemacetan lalu lintas dan keterbatasan prasarana lingkungan untuk kenyamanan pariwisata)
- Belum optimalnya pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.
- Belum optimalnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.

# PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN

**FOKUS:** Meningkatnya stabilitas perdagangan, pengendalian inflasi daerah dan ketersediaan sembako di DIY

- Belum optimalnya pengembangan dan promosi dagang produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- Belum optimalnya kerjasama dalam pengendalian ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Provinsi.
- Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota untuk peningkatan daya saing.

# PERMASALAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

FOKUS: Berkembangnya sektor industri yg mandiri untuk penguatan fundamental perekonomian dalam taskin peningkatan kesra di DIY

- Masih belum optimalnya kinerja kerjasama dan fasilitasi rencana pembangunan industri provinsi.
- Masih rendahnya daya saing produk IKM
- Rendahnya animo masyarakat terhadap produk sektor industri lokal
- Rendahnya inovasi produk sektor industri
- Rendahnya sinergitas pembangunan sektor industri
- Belum berkembangnya kemitraan antar usaha dan antar sektor hasil inisiatif pengusaha
- Rendahnya aksesibilitas sektor industri terhadap modal

# PERMASALAHAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

FOKUS: Realisasi penanaman modal yg sesuai potensi wilayah penguatan fundamental perekonomian dalam taskin peningkatan kesra di DIY

- Terbatasnya ketersediaan lahan untuk penanaman modal sesuai prioritas dan potensi daerah.
- Masih lemahnya sinergitas bidang penanaman modal daerah (indikasi dari: sebaran investasi antarwilayah dan antarsektor yang belum optimal).
- Semakin perlunya optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- Masih banyaknya kendala penanaman modal yang menyebabkan nilai ICOR masih relatif tinggi.

# PERMASALAHAN DI BIDANG KEHUTANAN

FOKUS: Meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan dan kelestarian hutan dan jasa lingkungan kehutanan di DIY

- Tingginya tekanan dari perkembangan sosial ekonomi masyarakat
- Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan
- Belum optimalnya kerjasama pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya)
- Ketidakjelasan tentang kepastian kawasan hutan AB, sehingga kepastian wilayah kelola juga belum bisa terpenuhi.
- Rendahnya sinergitas pembangunan sektor kehutanan (pengelolaan hutan)
- Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)

# Bidang Sosial Budaya

# Pendidikan

## Permasalahan

- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum sepenuhnya terwujud
- Capaian rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf belum optimal
- Layanan pendidikan non formal dan informal belum optimal
- Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang
- Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan masih terbatas
- Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik
- Kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik belum optimal (> pemahaman akan pluralitas sosial dan keberagaman budaya dlm masyarakat)
- Proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program magang di industri belum optimal
- Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke DIY masih belum optimal

## Isu Strategis

- Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan peningkatan kualitas pembelajaran
- Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas
- Penguatan Pendidikan Orang Dewasa (+ peningkatan keterampilan kerja)

# Kesehatan

## Permasalahan

- Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar belum optimal
- Penyakit menular (bbrp wilayah) dan tidak menular cenderung tinggi
- Upaya menjaga agar masyarakat tetap sehat belum optimal (JKN = yang sakit)
- Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

## Isu Strategis

- Penyediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat
- Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta peningkatan promosi kesehatan
- Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan

# Sosial

## Permasalahan

- PMKS masih cenderung tinggi (terutama bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban NAPZA, penderita HIV/AIDS, Pekerja Migran bermasalah).
- Kuantitas PSKS mengalami peningkatan; namun perannya belum sepenuhnya optimal.
- Penanganan penduduk miskin belum optimal (rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, rumah tangga hampir miskin/rentan) >Lintas sektoral

## Isu Strategis

- Pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas untuk PMKS yang berada di luar sistem keluarga, serta menjadikan pelayanan di dalam panti sebagai alternatif terakhir.
- Sinergisitas antarsektor dalam penanganan penduduk miskin

# Tenaga Kerja

## Permasalahan

- Minat penduduk usia kerja untuk bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru (berwirausaha) masih rendah
- Keterampilan pencari kerja masih rendah
- Belum optimalnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang terdaftar di DIY serta masih rendahnya implementasi terwujudnya kondisi lingkungan kerja sesuai norma kesehatan dan keselamatan kerja

## Isu Strategis

- Peningkatan kompetensi pencari kerja
- Pengembangan kesempatan berwirausaha

# Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Permasalahan

- Ketimpangan akses dan partisipasi perempuan dalam struktur dan kebijakan ekonomi serta proses produksi
- Kurangnya mobilisasi media massa untuk mempromosikan kontribusi positif perempuan kepada masyarakat
- Pengintegrasian perspektif gender belum sepenuhnya optimal (dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan)
- Perlindungan bagi anak dan perempuan terhadap berbagai tindak diskriminasi belum optimal
- Akses anak terhadap informasi semakin tinggi, namun pengawasan terhadap informasi layak anak belum optimal.
- Layanan yang ada saat ini cenderung bersifat reaktif dan lebih menekankan pada penanganan forensik dan memfokuskan kepada korban. Layanan berbasis keluarga dan masyarakat belum cukup mendapat perhatian. Masih ada sikap masyarakat dan praktik budaya yang permisif terhadap kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah.

## Isu Strategis

- Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan dari berbagai tindak kekerasan
- Peningkatan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (fisik, mental, dan sosial)

# Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## Permasalahan

- Ketiadaan data tunggal RTM
- Peran serta masyarakat masih cenderung stagnan
- Penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat belum sinergis

## Isu Strategis

- Sinergisitas pemberdayaan masyarakat

# Pengendalian Penduduk dan KB

## Permasalahan

- Sebaran penduduk yang kurang merata (plus kecenderungan meningkatnya penduduk lansia)
- Jumlah PUS yang tidak ber-KB masih cenderung tinggi
- Masih rendah dan belum meratanya pengetahuan masyarakat terkait dengan alat kontrasepsi jangka panjang
- Belum meratanya partisipasi pria dalam KB di wilayah DIY

## Isu Strategis

- Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB
- Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga

# Kebudayaan

## Permasalahan

- Upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat belum berjalan dengan optimal
- Belum optimalnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat (kebudayaan lokal belum menjadi *way of life*)
- Masih relatif rendahnya minat masyarakat mengunjungi museum (museum sbg sarana edukasi dan rekreasi)
- Pelestarian kawasan dan benda cagar budaya belum optimal
- Pemanfaatan Danais utk pengembangan kebudayaan belum optimal
- Terbatasnya HKI dan regulasi yang mendukung karya seni dan budaya

## Isu Strategis

- Penguatan karakter berbudaya (sembari tetap meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif).
- Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya (*plus* peningkatan dan pengembangan sumber daya kebudayaan)
- Pelestarian warisan budaya serta peningkatan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya

# Perpustakaan

## Permasalahan

- Minat baca masyarakat relatif masih rendah
- Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan
- Sosialisasi yang masih rendah dalam menjadikan perpustakaan internasional di DIY menjadi ikon pariwisata di DIY
- Kerjasama dengan stakeholder sudah dijalankan namun kurang bersinergis secara berkesinambungan

## Isu Strategis

- Peningkatan aksesabilitas dan layanan perpustakaan
- Peningkatan intensitas sosialisasi dan pembudayaan kegemaran membaca

Note:

Tantangan pembangunan perpustakaan ke depan adalah mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan karya budaya, mengingat adanya kecenderungan masyarakat yang lebih memanfaatkan informasi internet daripada membaca buku teks serta meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat.

# Kearsipan

## Permasalahan

- Pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi belum sepenuhnya optimal
- Jumlah khasanah arsip sebagai warisan budaya masih relatif terbatas
- Pengelolaan arsip dinamis oleh SKPD belum sepenuhnya optimal

## Isu Strategis

- Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK

# Kepemudaan dan Olah Raga

## Permasalahan

- Belum optimalnya pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan (keterampilan dan kecakapan hidup serta kemandirian pemuda masih belum optimal)
- Prasarana dan sarana olahraga relatif masih minim/terbatas
- Belum optimalnya layanan pendidikan keolahragaan
- Belum optimalnya pembudayaan olahraga
- Belum optimalnya capaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga
- Iptek keolahragaan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga

## Isu Strategis

- Peningkatan peran organisasi kepemudaan dan perkuatan karakter, jati diri, peran aktif serta daya saing pemuda
- Peningkatan budaya dan prestasi olahraga (kerjasama dan kemitraan pemda dg dunia usaha, termasuk industri olahraga dan masyarakat perlu selalu ditingkatkan)

# Transmigrasi

## Permasalahan

- Kerja sama antarpemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal.
- Pemantauan terhadap transmigran yang ditempatkan belum optimal

## Isu Strategis

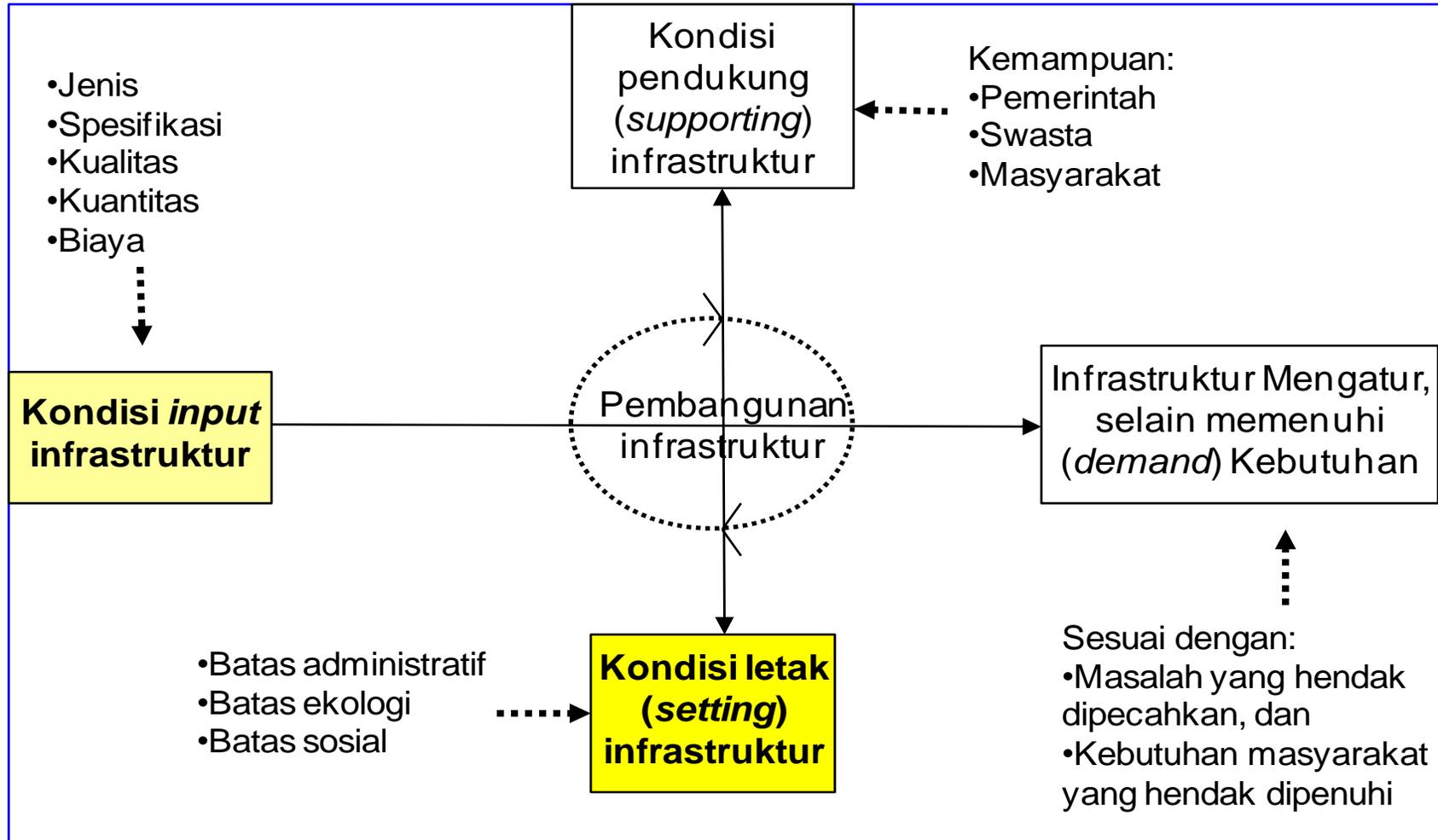
- Koordinasi dan sinergisitas antarsektor dalam pemenuhan hak transmigran

# **Bidang**

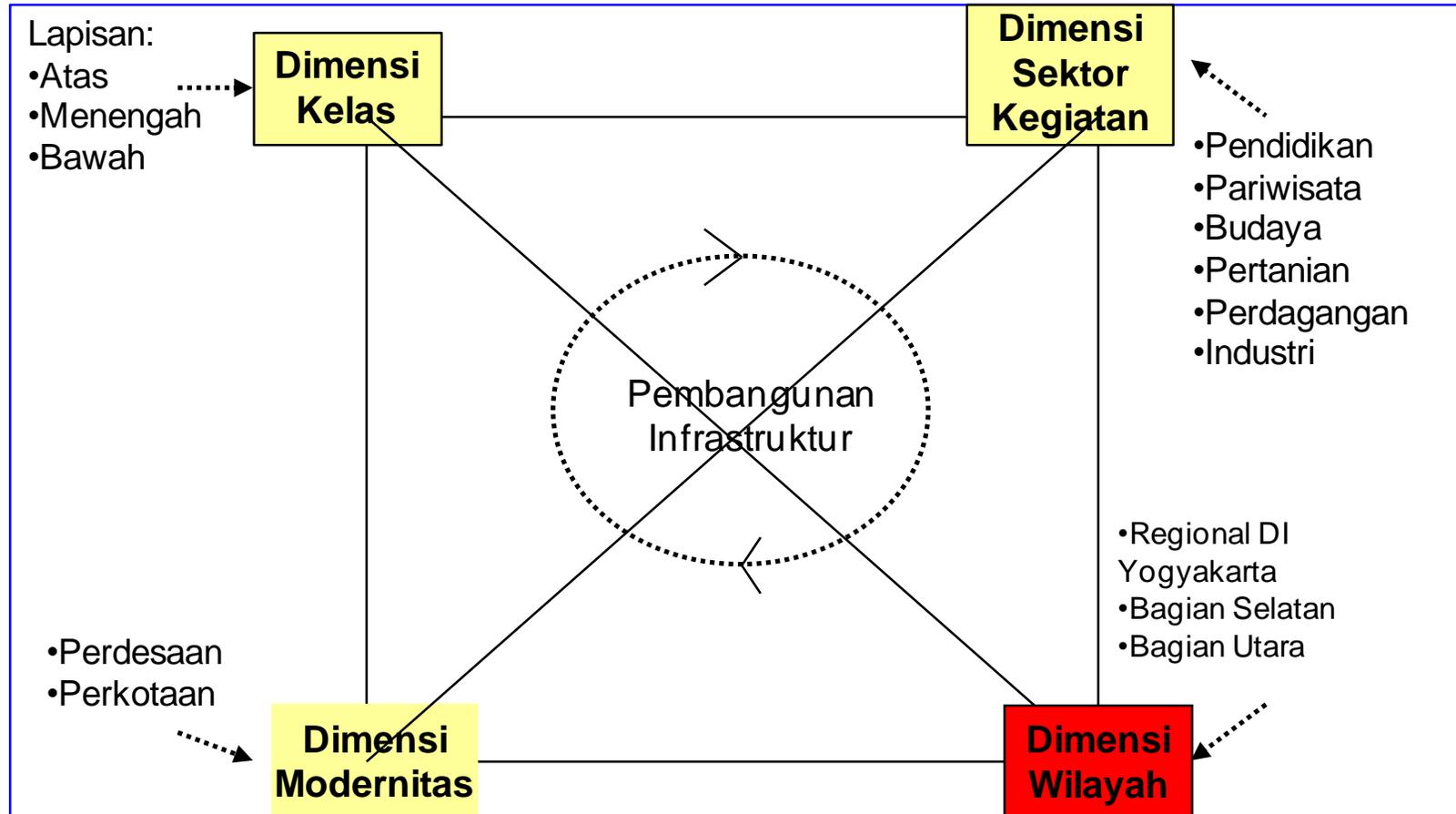
# **Infrastruktur/Kewilayahan**

## **(Eriadi, Ibnu, Lilik)**

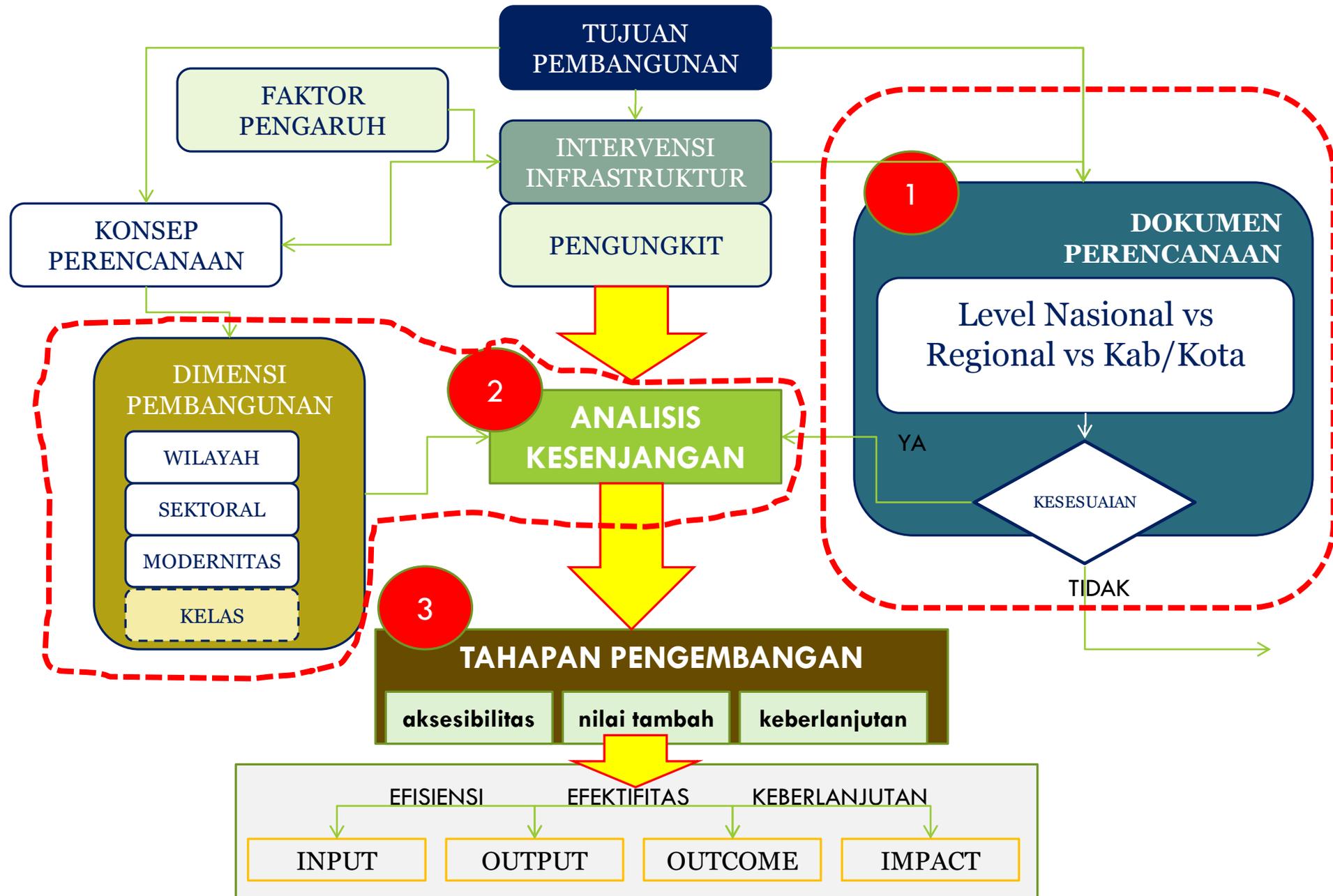
# INFRASTRUKTUR & FAKTOR YANG PENGARUHINYA



# DIMENSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



# ALUR PIKIR



# PERMASALAHAN PERKEMBANGAN WILAYAH

- **Tingginya tekanan penduduk terhadap lahan, terutama lahan pertanian.** Masalah ini terus meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk dan konversi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang terus meningkat. Konversi lahan pertanian banyak terjadi di pinggiran Kota Yogyakarta terutama di wilayah Kabupaten Sleman. Konversi lahan pertanian tersebut mengakibatkan produksi pertanian mengalami penurunan dan mengancam ketahanan pangan di wilayah DIY.
- **Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lereng tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung Api Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuan air tanah di wilayah tangkapan air utama.** Penurunan imbuan air tanah juga disebabkan oleh tingginya lahan terbangun akibat berkembangnya berbagai fungsi kawasan di wilayah resapan air.

# PERMASALAHAN PERKEMBANGAN WILAYAH

- ❑ Adanya peningkatan volume lalu lintas sebagai dampak berkembangnya aktivitas perekonomian dan **mobilitas penduduk mengakibatkan meningkatnya pencemaran udara**. Pencemaran udara terutama terjadi di wilayah perkotaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya polutan udara, seperti CO, NO<sub>2</sub>, HC dan pertikulat lainnya. Terjadinya peningkatan polutan udara juga disebabkan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor.
- ❑ Pada saat ini di wilayah DIY, khususnya di **Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sangat marak dengan berkembangnya pendirian hotel berbintang, mal, dan apartemen**. Berkembangnya hotel, mal, dan apartemen tersebut jika tidak terkendali dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan. **Potensi gangguan lingkungan tersebut antara lain menyangkut semakin menurunnya air tanah dan potensi kemacetan** yang akan merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hotel, mal, ataupun apartemen.

# PERMASALAHAN PERKEMBANGAN WILAYAH

- ❑ Berkembangnya lahan terbangun, seperti lahan permukiman, hotel, mal, dan apartemen, juga berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau terutama di wilayah perkotaan. Dengan berkurangnya lahan terbuka hijau akan mengurangi kemampuan lingkungan untuk mereduksi pencemaran udara dan sekaligus mengurangi resapan air. Peningkatan lahan terbangun juga akan meningkatkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sehingga berpotensi semakin meningkatnya aliran permukaan yang akan mengakibatkan genangan dan banjir.
- ❑ Sebagian wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di wilayah DIY telah banyak mengalami tekanan penduduk yang mengakibatkan adanya alih fungsi lahan dan pencemaran sungai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian wilayah DAS mengalami degradasi lingkungan yang ditandai oleh tingginya sedimentasi dan fluktuasi debit air pada musim penghujan dan musim kemarau cukup tinggi.

# PERMASALAHAN PERKEMBANGAN WILAYAH

- ❑ **Kawasan karst** di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi sehingga kegiatan **penambangan dan pembangunan yang terus meningkat** tanpa adanya pengendalian dipastikan akan **mempercepat kerusakan ekosistem** kawasan karst tersebut.
- ❑ Wilayah DIY sebagian kawasan permukimannya dilewati sungai. Di wilayah sekitar sungai tersebut telah banyak dimanfaatkan untuk permukiman dan sebagian telah melanggar sempadan sungai. **Permukiman di sekitar sungai, terutama di wilayah Kota Yogyakarta, terus mengalami pemadatan sehingga memunculkan kawasan kumuh (*slum areas*). Berkembangnya kawasan kumuh di sekitar sungai menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan permukiman.**

# Amanah

## RPJMN 2015-2019

# Agenda Pembangunan Nasional

No	Agenda (NAWA CITA)	Sub Agenda	Keterangan
1	MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif;</li> <li>2) Memperkuat Sistem Pertahanan Nasional;</li> <li>3) Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim;</li> <li>4) Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri;</li> <li>5) Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran;</li> <li>6) Memperkuat Peran Indonesia dalam Kerjasama Global dan Regional;</li> <li><b>7) Meminimalisasi Dampak Globalisasi;</b></li> <li>8) Membangun Industri Pertahanan Nasional;</li> <li>9) Membangun Polri yang Professional; dan</li> <li><b>10) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan.</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong para <b>pelaku usaha untuk terus memanfaatkan hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional secara maksimal</b>, terutama dalam rangka untuk: mengembangkan akses pasar ekspor, meningkatkan keterlibatan dalam jaringan produksi global (<i>global production network</i>), mengembangkan mitra bisnis, serta menjaring arus investasi masuk ke Indonesia.</li> <li>• <b>Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu</b> untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan</li> </ul>

# Agenda Pembangunan Nasional

No	Agenda (NAWA CITA)	Sub Agenda	Keterangan
2	<b>MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;</li> <li>2) <b>Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;</b></li> <li>3) <b>Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;</b></li> <li>4) <b>Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan</b></li> <li>5) <b>Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan</b> dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik</li> <li>• Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan: meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; <b>makin efektifnya penerapan <i>e-government</i> untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi <i>open government</i> pada seluruh instansi pemerintah.</b></li> <li>• Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan <b>meningkatnya kualitas pelayanan publik.</b></li> <li>• Meningkatnya <b>keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik</b>, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi <i>open government</i> pada seluruh instansi pemerintah</li> </ul>

# Agenda Pembangunan Nasional

No	Agenda (NAWA CITA)	Sub Agenda	Keterangan
3	MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN	1) Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris	1) Pengembangan Kawasan Perbatasan 2) Pengembangan Daerah Tertinggal 3) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan <b>4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah</b> 5) Penataan Daerah Otonom Baru Untuk Kesejahteraan Rakyat
		2) Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia.	1) PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS: 1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah 2. Percepatan Pembangunan Konektivitas 3. Peningkatan Kemampuan SDM dan Iptek 4. Regulasi dan Kebijakan 5. Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha 2) PEMBANGUNAN PERKOTAAN 3) PENINGKATAN KETERKAITAN KOTA-DESA 4) TATA RUANG
		3) Penanggulangan Kemiskinan	Perlindungan sosial diperlukan agar <b>penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok</b> , apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi. Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi, <b>perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan</b> . Sementara itu, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan dibutuhkan <b>pembekalan terhadap penduduk kurang mampu dan rentan berupa keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis</b> sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

# Agenda Pembangunan Nasional

No	Agenda (NAWA CITA)	Sub Agenda	Keterangan
4	<b>MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;</li><li>2) Mencegah dan Memberantas Korupsi;</li><li>3) Memberantas Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar;</li><li>4) Memberantas Narkoba dan Psikotropika;</li><li>5) Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah; dan</li><li>6) <b>Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.</b></li></ol>	Tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan <b>mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal.</b>

# Agenda Pembangunan Nasional

No	Agenda (NAWA CITA)	Sub Agenda	Keterangan
5	<b>MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA</b>	1) Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; 2) Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar; 3) Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja, dan 5) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat (cq <b>peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang</b> untuk mengurangi resiko <i>drop-out</i>)</li> <li>• Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing</li> </ul> </li> <li>✓ <b>Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan.</li> <li>✓ Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</li> <li>✓ <b>Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b></li> <li>✓ Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas</li> </ul> </li> </ul>

# Agenda Pembangunan Nasional

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reformasi agraria yang dilakukan melalui redistribusi tanah, legalisasi aset (sertifikasi tanah), sekaligus dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat kpd masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan terutama petani, nelayan, usaha kecil menengah (UKM), dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</li><li>• Memberikan akses bagi penduduk berpenghasilan 40 persen terendah ke dalam kegiatan ekonomi produktif. Kesempatan yang luas bagi masyarakat kurang mampu untuk berkiprah dalam pembangunan, akan mempercepat penurunan kemiskinan sehingga meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga yang berkelanjutan. <b>Berbagai potensi dikembangkan sesuai kondisi ekonomi dan wilayah. Peningkatan kapasitas, keterampilan, akses kepada sumber pembiayaan dan pasar, diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat kepada sumberdaya produktif</b><ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal</li><li>✓ Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu</li><li>✓ Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui peningkatan kualitas pendampingan</li><li>✓ <b>Optimalisasi aset-aset produksi secara memadai bagi masyarakat kurang mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan</b></li></ul></li></ul> |
|--|--|--|

# Agenda Pembangunan Nasional

No	Agenda (NAWA CITA)	Sub Agenda	Keterangan
6	<b>MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL</b>	1) Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; 2) Membangun Transportasi Massal Perkotaan; 3) Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar; 4) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur; 5) Penguatan Investasi; 6) Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan; 7) Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi 8) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional; 9) Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional; 10) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 11) Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan</li> <li>Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman:               <ol style="list-style-type: none"> <li>PEMBANGUNAN PERUMAHAN:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan efektifitas dan efisiensi <b>manajemen lahan dan hunian di perkotaan</b> melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (<i>land consolidation</i>), bank tanah (<i>land banking</i>), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf.</li> </ul> </li> <li>PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN (Permukiman kumuh perkotaan; SPAM; sanitasi layak: air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan; Bangunan Gedung)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi (<b>JAGA AIR, SIMPAN AIR, HEMAT AIR</b>)</li> <li>✓ Bauran Air Domestik, yakni upaya untuk mengoptimalkan berbagai alternatif sumber air domestik yang tersedia sesuai tujuan pemanfaatan air, termasuk di dalamnya <b>pemakaian air tingkat kedua (<i>secondary water uses</i>) dan daur ulang air yang telah dipergunakan (<i>water reclaiming</i>)</b>.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur + Pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur</li> <li>Penguatan investasi adalah <b>menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing</b>, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan + <b>Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang</b></li> </ul>

# Agenda Pembangunan Nasional

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan iptek bagi <i>daya saing sektor produksi</i></li><li>• <b>Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kota diarahkan berfungsi sebagai:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1) pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;</li><li>2) tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;</li></ol></li><li>• <b>Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang;</li><li>2) akselerasi pertumbuhan industri manufaktur;</li><li>3) <b>akselerasi pertumbuhan pariwisata;</b></li><li>4) <b>akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif;</b></li><li>5) <b>peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.</b></li></ol></li><li>• Meningkatkan <b>daya saing produk ekspor non-migas dan jasa</b> melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional.</li><li>• <b>Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja</b> dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif, dengan mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan, dan pendampingan bagi lembaga pelatihan provinsi, serta <b>lembaga pelatihan provinsi menjadi unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan kabupaten/kota</b></li></ul></li></ul>
--	--	--	---

# Agenda Pembangunan Nasional

No	Agenda (NAWA CITA)	Sub Agenda	Keterangan
7	<b>MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan Kedaulatan Pangan;</li> <li>2) Peningkatan Ketahanan Air;</li> <li>3) Peningkatan Kedaulatan Energi;</li> <li>4) Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;</li> <li>5) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;</li> <li>6) Penguatan Sektor Keuangan; dan</li> <li>7) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pemantapan ketahanan pangan</b> menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) stabilisasi harga bahan pangan; (iii) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) <b>peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.</b></li> <li>• Penanganan DAS dan konservasi sumber daya air:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengelolaan kawasan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan kapasitas sumber daya air</li> <li>✓ Penataan aktivitas masyarakat, pertanian, industri berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah dalam rangka menjamin ketersediaan dan kualitas air</li> </ul> </li> <li>• Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan penggunaan air dari <i>"rain water harvesting"</i> untuk keperluan refinery industri; serta penggunaan non konsumsi lainnya seperti perkantoran dan lain-lain;</li> <li>✓ Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip <b>reduce, mengembangkan reuse dan recycle</b>; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (<i>safe use of wastewater in agriculture</i>)</li> </ul> </li> </ul>

# Agenda Pembangunan Nasional

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan <b>kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan</b>, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat</li><li>• <b>Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana</b></li><li>• Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir + <b>Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari</b>, serta Penguatan Peran SDM dan Iptek Kelautan</li><li>• <b>Meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal</b> dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan</li></ul>
--	--	--

# Agenda Pembangunan Nasional

No	Agenda (NAWA CITA)	Sub Agenda	Keterangan
8	<b>MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA</b>	Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya <b>kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;</b></li> <li>• Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;</li> <li>• Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah;</li> <li>• Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;</li> <li>• Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja;</li> <li>• Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi;</li> <li>• Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.</li> </ul>

# Agenda Pembangunan Nasional

No	Agenda (NAWA CITA)	Sub Agenda	Keterangan
9	<b>MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA</b>	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;</li> <li>• Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;</li> <li>• Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;</li> <li>• Meningkatnya ketaatan semua unsur didalam masyarakat terhadap hukum sesuai amanat konstitusi;</li> <li>• Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa;</li> <li>• Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan antar suku-bangsa secara nasional dan internasional;</li> <li>• Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;</li> <li>• Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan;</li> <li>• Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda,</li> <li>• Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama</li> <li>• Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional</li> </ul>

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi DI Yogyakarta

## **PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG**

1. Pembangunan jalur KA Perkotaan Yogyakarta (tahap 1) termasuk akses ke Bandara baru Yogyakarta
2. Elektrifikasi jalur KA Kutoarjo-Yogya-Solo
3. Jalur KA menuju Bandara Kulonprogo

## **PERHUBUNGAN DARAT**

1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Yogyakarta

## **PERHUBUNGAN UDARA**

1. Pembangunan Bandara International Kulon Progo

## **JALAN**

1. Pembangunan Jalan Lintas Pantasi Selatan Jawa (Temon-Bugel-Girijati-Baron-Jepitu-Jerukwudel)
2. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Yogyakarta

## **KETENAGALISTRIKAN**

1. Program Listrik Gratis

## **Telekomunikasi dan Informatika**

1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi DI Yogyakarta

## **SUMBER DAYA AIR**

1. Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Opak dan anak sungainya Gunung Kidul, Bantul
2. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Serang dan anak sungainya Kulon Progo
3. Rehabilitasi, peningkatan dan perkuatan tebing Sungai Opak dan anak sungainya Gunung Kidul, Bantul
4. Pembangunan Sabo/DAM Pengendali Sedimen Sleman
5. Pembangunan Kantong Lahar Kali Gendol Sleman
6. Consulting Service Urgent Disaster Merapi
7. Rehabilitasi Sabo/DAM Pengendali Sedimen di DIY Sleman
8. Pembangunan Jetty Glagah Kulon Progo
9. Rehabilitasi Muara sungai dan Jetty di WS POS Kulon Progo, Bantul
10. Pembangunan Waduk Karang Talun Sleman
11. Pembangunan Long Storage Karang Talun dan Kali Bawang Sleman, Kulon Progo
12. Pembangunan Waduk Gari Gunung Kidul
13. Pembangunan embung kecil / telaga Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, Temanggung, Magelang

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi DI Yogyakarta

## **KESEHATAN**

1. Penurunan Angka Kematian ibu dan program PHBS lebih ditingkatkan.
2. Program kesehatan reproduksi pada remaja.
3. Pengintegrasian Jamkesda dan JKN (pusat menentukan by name by address, atau hal tersebut diserahkan kepada daerah diharapkan perubahan dari daerah)
4. Pengembangan rumah sakit rujukan nasional dan rujukan regional.

# MATURNUWUN